



REPUBLIK INDONESIA



# Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam Rancangan Awal RKP 2018

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan dalam Pembukaan Rangkaian Musrenbang Provinsi Kep. Bangka Belitung

Pangkal Pinang, 7 April 2017



**1**

**Pengantar**

# Pengantar

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan **Money Follows Program**.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan **Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial** dengan memperhatikan pada:
  - Pengendalian perencanaan
  - Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018
  - Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
  - Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

**RKP  
2018**



**Menajamkan Prioritas Nasional**



**10 PN dan 30  
Program Prioritas**



**Memastikan pelaksanaan program**



**Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3)**



**Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan**



**Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PIN A dan Swasta**

# Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018

Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan

## SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

### Melanjutkan implementasi *Money Follow Program*

1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (*Belanja K/L – Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU - PINA*)
2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”)
3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran

### Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah

1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan
2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional
3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional
4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja operasional – belanja prioritas)

### Memperkuat kendali program

1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu
2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program
3. Melaksanakan data *sharing* (*Bappenas-KemKeu-Menko*) untuk pengendalian dan monev
4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan

# Pengendalian Perencanaan

Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk memastikan rencana dijalankan dengan baik

## PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba

KEMENTERIAN/LEMBAGA	Target	(Rp M)	Lokasi
<b>KEMENTERIAN PU &amp; PERA</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu</li> </ul>	25 Km	150	Kab. Samosir
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Jalan Tol Baru Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi</li> </ul>	18 Km	59,5	Provinsi Sumatera Utara
<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir</li> </ul>	1 Paket	6,5	Kab. Samosir
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi Kawasan Danau Toba</li> </ul>	1 Paket	9,8	Tersebar
<b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan jalur kereta Api Medan-Kuala Namu-Pematang Siantar</li> </ul>	8 Km	1.130,0	Provinsi Sumatera Utara
<b>BUMN</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Bandar Udara Silangit (AP 1)</li> </ul>	1 paket	100,0	Kab. Tapanuli Utara
<b>KEMENTERIAN PARIWISATA</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyek Promosi produk destinasi wisata Danau Toba melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di Eropa dan Timur Tengah</li> </ul>	8 paket	10,7	Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyek Peningkatan sarana dan prasarana Akademi Pariwisata Medan</li> </ul>	1 unit	25,0	Kota Medan

### PRIORITAS NASIONAL

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

### PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

### KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Sarpras Transportasi
2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan
3. Penyiapan Daya Tarik Wisata

SASARAN, LOKASI DAN PAGU

# Proyek Prioritas Disusun Hingga Berbasis Kewilayahan

Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (APBN/PHLN)

Jalan Palipi - Parmonangan (DAK)

Jalan SP.Provinsi-Desa Hutarihit (DAK)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu (APBN/SBSN)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu (APBN/SBSN)



## CONTOH : Kawasan Pariwisata Danau Toba

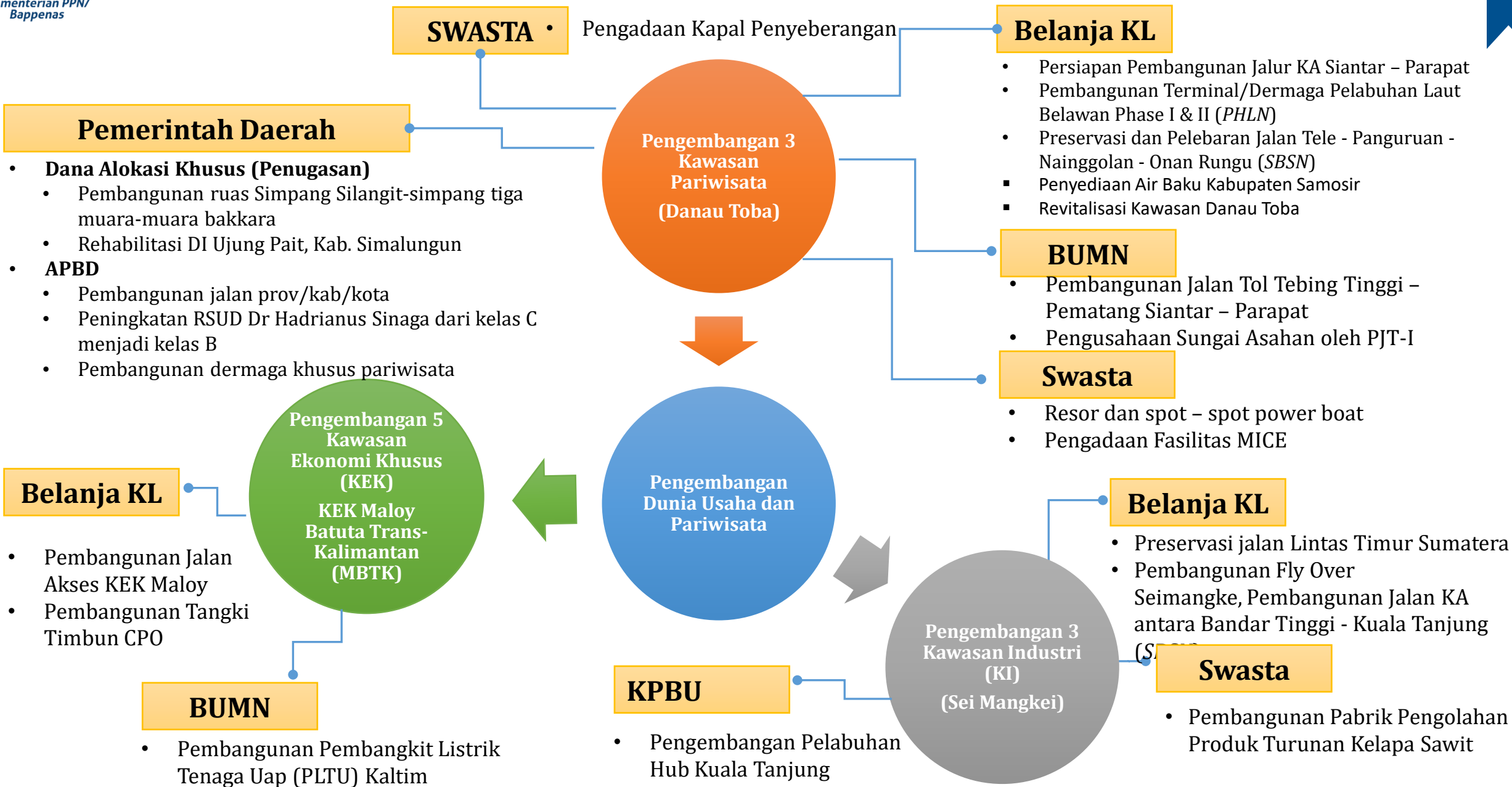
Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir (APBN)

Revitalisasi Kawasan Danau Toba (APBN)

Pembangunan Jalan Tol Medan -Kualanamu - Tebing Tinggi (APBN/PHLN)

Pengembangan Bandara Silangit (BUMN)

# Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan



## RANCANGAN BIDANG DAK FISIK TA 2018

DAK REGULER		DAK AFIRMASI	DAK PENUGASAN
Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target <b>memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b> dan mendukung <b>ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan</b>		Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar <b>yang fokus pada Lokasi Prioritas</b> (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi ( <i>Area/Spatial Based</i> ).	Tujuan: Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.
1. Pendidikan	10. Pariwisata	1. Kesehatan (Puskesmas)	1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan dan KB	11. Jalan	2. Perumahan dan Permukiman	2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)
3. Air Minum		3. Transportasi	3. Air Minum
4. Sanitasi		4. Pendidikan	4. Sanitasi
5. Perumahan dan Permukiman		5. Air Minum	5. Jalan
6. Pasar		6. Sanitasi	6. Irigasi
7. IKM			7. Pasar
8. Pertanian			8. Energi Skala Kecil
9. Kelautan dan Perikanan			9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terdapat **penambahan 4 bidang DAK Reguler baru** yaitu **Air Minum dan Sanitasi** untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta **Pasar dan Jalan** untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan.

Terdapat penambahan **3 bidang DAK Afirmasi baru** yaitu **Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi**, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci.

Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017, terdapat penambahan **1 bidang DAK** dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya berada di bawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017.

Terdapat bidang – bidang yang **kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK**, namun berbeda dalam fokus menu kegiatan dan lokasinya.

# 2

## Kerangka Makro dan Wilayah

# Asumsi Ekonomi Makro 2018



INDIKATOR EKONOMI	Skenario 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 6,1
Inflasi (%): average	3,5 ± 1
Nilai Tukar (USD/IDR): average	13.600 - 13.900
ICP (USD/Barrel)	55
Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	800
Lifting Gas (BOE/hari)	1.200

## Resiko

- Asumsi ekonomi makro 2018 disusun dengan asumsi terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia.
- Harga minyak dunia yang lebih tinggi dapat berdampak positif terhadap penerimaan. Namun dapat berdampak juga pada kenaikan inflasi

**6** Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah:



**3** Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah:



Komponen Sisi Produksi	Pertumbuhan (%)	Share (%)
PDB	5,4- 6,1	100
- Industri Pengolahan	5,1-5,7	20,8-21,0
- Konstruksi	7,7-8,4	11,3-11,4
- Perdagangan	5,6-6,3	13,2-13,2
- Informasi dan Komunikasi	10,5-11,9	3,7-3,8
- Jasa Keuangan	10,6-11,5	4,4-4,5
- Pertanian	3,6-4,0	12,8-12,9
- Transportasi	8,3-9,2	5,6-5,6
- Listrik dan Gas	5,8- 6,8	1,2-1,2

# Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Pengeluaran

Komponen Sisi Pengeluaran <sup>5</sup>	Pertumbuhan Tahun 2018 (%)	
	Baseline	Skenario
PDB	5,2	5,4 - 6,1
- Konsumsi RT	5,2	<b>5,3 - 5,4</b>
- Konsumsi LNPRT	8,5	8,6 - 8,7
- Konsumsi Pemerintah	4,6	4,0 - 4,7
- Investasi (PMTB)	5,6	<b>6,2 - 8,0</b>
- Ekspor	1,8	2,8 - 3,8
- Impor	1,9	3,2 - 4,0

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 - 6,1 Persen

**Konsumsi dan investasi** harus menjadi pendorong pertumbuhan  
Kebutuhan Investasi: Rp 5.191,5 - Rp 5.293,7 T



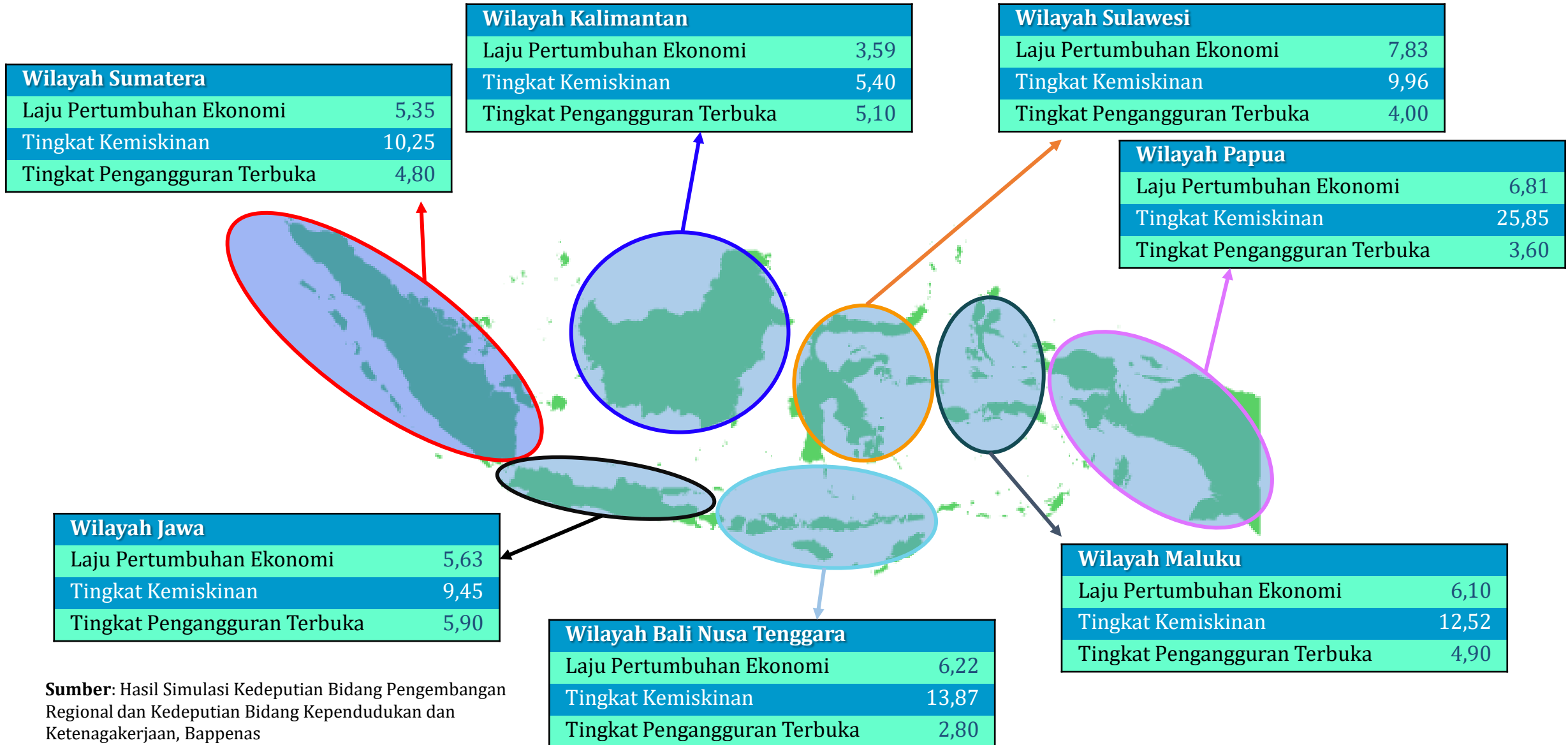
Konsumsi pemerintah akan relatif terbatas seiring ruang fiskal yang sempit, dan prioritas pada alokasi belanja modal



- Kinerja ekspor masih terbatas seiring dengan lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas. Namun ekspor jasa akan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan pariwisata
- Impor akan tumbuh lebih cepat dari ekspor, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik



# Kontribusi Pembangunan Wilayah Per Pulau Tahun 2018 Untuk Mendukung Pertumbuhan Nasional 5,4-6,1 Persen



**Sumber:** Hasil Simulasi Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Bappenas

# Peranan Pemerintah untuk Mendorong 5,4 - 6,1 Persen

Untuk mencapai 5,4 - 6,1 persen → **Perlu Kerja Keras dan Langkah Konkrit**



## UPAYA PEMERINTAH



### Investasi Pemerintah secara selektif

- ✓ Ruang untuk peningkatan terbatas, tetapi tetap dijaga **dengan merealokasi belanja non produktif ke belanja investasi**
- ✓ Fokus pada proyek yang **mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta**:
  - a. Infrastruktur listrik
  - b. Infrastruktur transportasi dan logistik
    - Pelabuhan (penurunan *dwelling time*)
    - Pergudangan
    - Jalan → untuk mendukung konektivitas



### Fasilitasi Kebijakan untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi

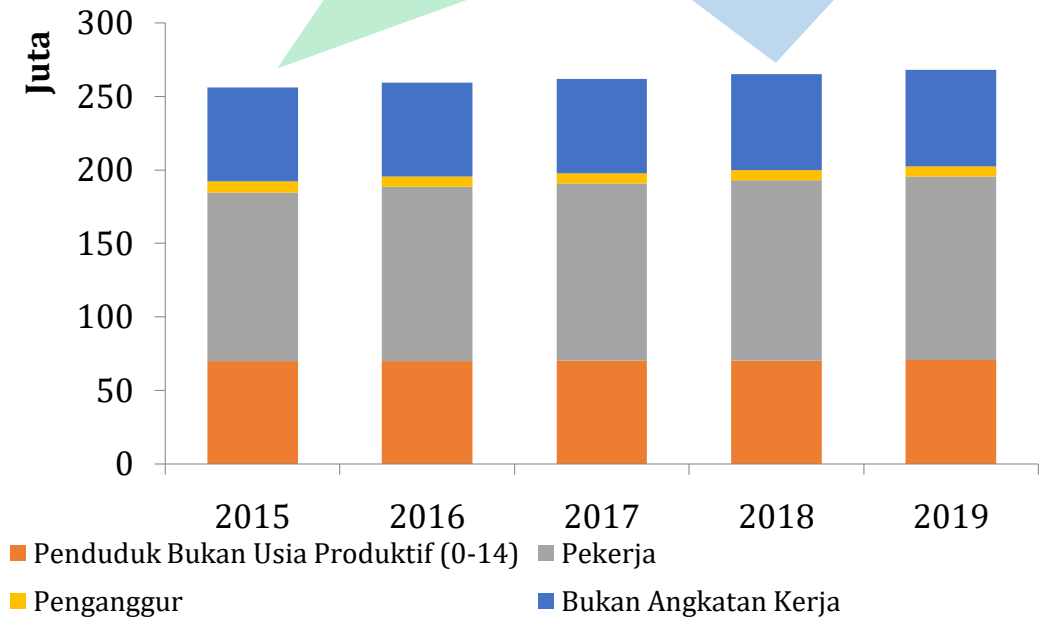
- ✓ **Peningkatan Investasi Swasta**
  - **Perlu fokus untuk menghapuskan hambatan berkembangnya swasta di 6 sektor utama** (industri pengolahan nonmigas, pertanian, perdagangan, konstruksi, informasi telekomunikasi, dan jasa keuangan)
  - Deregulasi peraturan investasi (peningkatan kemudahan berusaha, EoDB menuju peringkat 40)
  - **Pembenahan iklim investasi di daerah**
  - **Fasilitasi masalah investasi** (RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, penyelesaian pengaduan masalah investasi)
  - Pemanfaatan dan penyaluran **dana repatriasi untuk investasi**
  - Perbaiki **iklim ketenagakerjaan**: penyempurnaan UU ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN)
- ✓ **Menjaga Daya Beli Masyarakat**
- ✓ **Reformasi Struktural**

# Target Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2018

TAHUN 2016

Jumlah penduduk miskin sekitar 27,8 juta jiwa  
(Sumber: BPS, Sept 2016)

Jumlah penduduk berdasarkan SUPAS 2015 = 255,18 juta jiwa  
Jumlah penduduk berdasarkan proyeksi = 265,02 juta jiwa



TAHUN 2018



Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14): 70,5 juta



Penduduk Usia Produktif (15+): 194,5 juta



Angkatan Kerja: 129,4 juta



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperkirakan 67%

- TARGET PEMBANGUNAN 2018**
- Target tingkat kemiskinan: 9-10%
  - Target tingkat pengangguran terbuka: 5,3-5,5%
  - Target rasio gini: 0,38

Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun

# Rencana Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2018

## KPBPB Sabang

- Pembangunan Intake & Pipa Transmisi Air Baku Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar
- Pembangunan Bendung Sei Wampu Kab. Langkat
- Pembangunan Bendungan Lausimeme
- Pembangunan Bendungan Muara Sei Gong di Kota Batam
- Pembangunan Embung Air Baku DAS Kawal di Kab. Bintang
- Pembangunan Intake dan Jaringan Air Baku MEBIDANG

## KEK & KI SEI MANGKEI

Kab. Simalungun, Sumut

### Beberapa Rencana Proyek K/L

- Pembangunan rumah susun
- Pembangunan Jalan Poros dan Jalan Lingkungan
- Cakupan Geoid teliti sebagai referensi tinggi bagi peta dasar skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK dan KI
- Pembangunan PLTU Sumut 1, 2x150 MW
- Pembangunan PLTGU/MGU Sumbagut Peaker-1, 250 MW
- Pembangunan PLTGU/MGU Sumbagut Peaker 3-4, 2x250 MW

## KI Kuala Tanjung

Jalan Bebas Hambatan Medan -Kuala Namu

## Pariwisata Danau Toba

Kab. Samosir, Sumut

### Beberapa Rencana Proyek K/L

- Pembangunan Jalan Tol Kualanamu - Tebing Tinggi
- Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu KSPN Danau Toba
- Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu KSPN Danau Toba
- Bandar Udara Sibisa (Parapat) KSPN Danau Toba
- Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir
- Revitalisasi Kawasan Danau Toba

## KPBPB Batam, Bintan, Karimun

## Natuna

Pembangunan Jalan Mendukung Pusat Pertahanan di Natuna

- Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Bajayu, 4.000 Ha
- Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Desa Pasar Ipuh Kabupaten Mukomuko
- Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Batang Air Dingin
- Pembangunan Bangunan Pengendali Sedimen Batang Kuranji dan Anak Sungainya (segmen hulu)

## KEK TANJUNG API-API

Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan

## KEK TANJUNG KELAYANG

Kab. Belitung, P. Bangka Belitung

### Beberapa Rencana Proyek K/L

- Pengembangan Bandara Udara Hanandjoeddin
- Pembangunan Waduk Gunung Tajam (400 liter/detik)
- Pelebaran Jalan Nasional Tanjung Pandan - Tanjung Tinggi
- Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK
- Pembangunan PLTMG Belitung Peaker 40 MW

## KI Tanggamus

Kab. Tanggamus, Lampung

- Pembangunan Bendungan Way Sekampung di Kab Pringsewu
- Pembangunan Daerah Irigasi Jabung
- Pembangunan DI Batang Sinamar
- Pembangunan DI. Lematang

## Wilayah Sumatera 2018

Target Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,35
Target Sasaran Tingkat Kemiskinan	10,25
Target Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80

Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran terbuka :

1. Provinsi Kep.Riau
2. Provinsi Aceh
3. Provinsi Sumatera Utara.
4. Provinsi Kep. Bangka Belitung

Sektor-sektor penggerak perekonomian

1. Industri Pengolahan
2. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
3. Pertambangan dan Penggalian
4. Perdagangan besar dan eceran
5. Konstruksi

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :

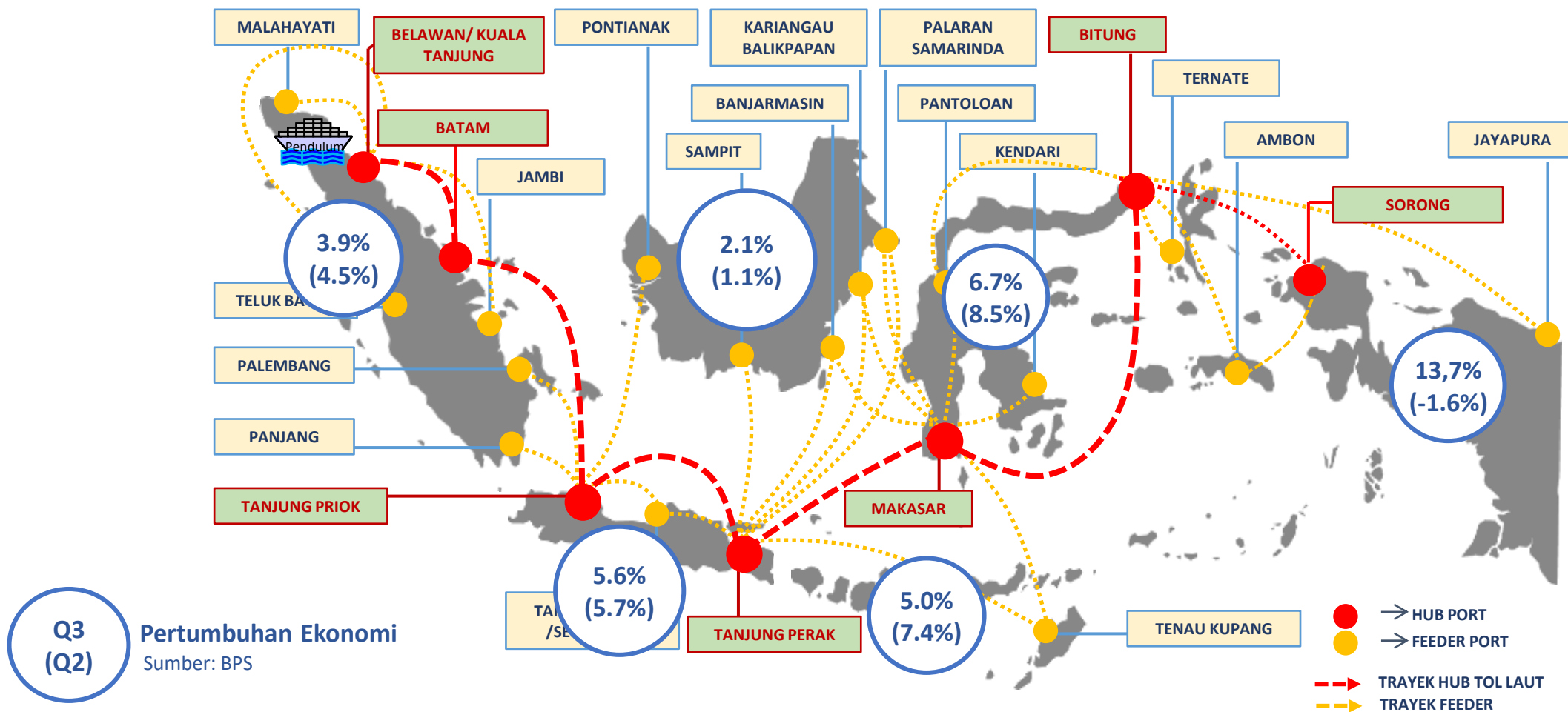
1. Provinsi Bengkulu
2. Provinsi Aceh
3. Provinsi Lampung
4. Provinsi Sumatera Selatan
5. Provinsi Sumatera Utara

Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018

Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

# Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi Spasial

“Untuk mengurangi ketimpangan dan penurunan biaya logistik, diperlukan pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahan dan meningkatkan produktivitas daerah-daerah potensial terutama di Kawasan Timur (Sulawesi yang memiliki pertumbuhan >> rata-rata nasional) yang terintegrasi dengan tol laut sebagai tulang punggung distribusi logistik”



# 3

## Rancangan Tema, Prioritas Nasional, dan Program Prioritas

## TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

### Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018

- Memperbaiki **Kualitas Belanja**.
- Peningkatan **iklim usaha dan iklim investasi** yang lebih kondusif
- Peningkatan **daya saing dan nilai tambah** industri
- Peningkatan **peran swasta** dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur



**Memprioritaskan Belanja Pemerintah  
Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas  
Nasional**

### Peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

RKP 2015*)	RKP 2016	RKP 2017	RKP 2018	RKP 2019
Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas	Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah	<b>MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN</b>	<i>Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019</i>

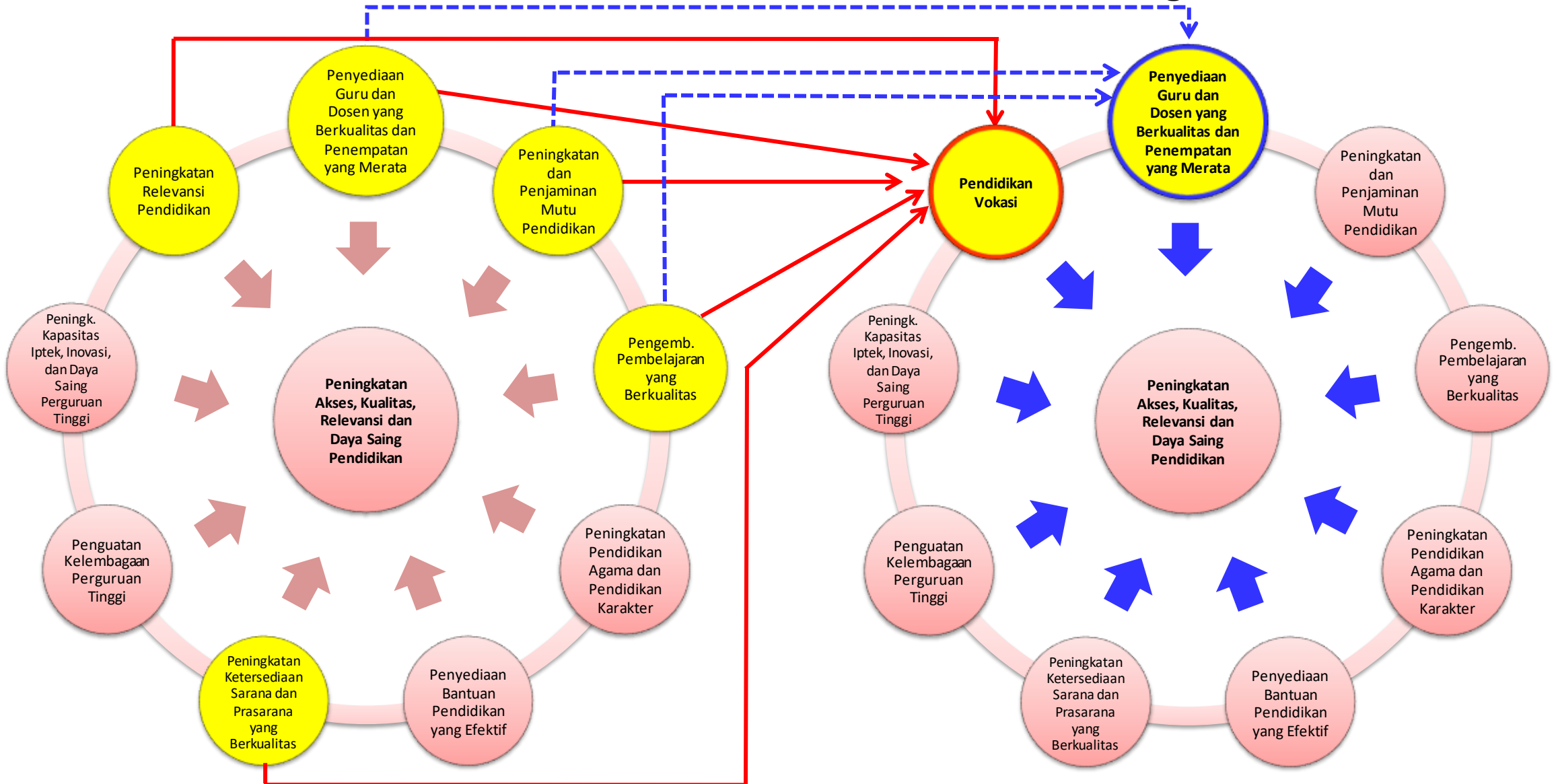
<b>URAIAN</b>	<b>RKP 2017</b>	<b>RANCANGAN RKP 2018</b>
Prioritas Nasional	23	10
Program Prioritas	88	30

- Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan
- Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran

# Contoh Penajaman Program Prioritas: Prioritas Nasional Pendidikan

RKP 2017

Rancangan RKP 2018



# Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018

Revolusi Mental

Kesetaraan Gender

## I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru

## II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

## III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

## IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

## V. KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

## VI. KETAHANAN PANGAN

15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

## VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

## VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

## IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua

## X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 27. Penguatan Pertahanan            | 29. Kepastian Hukum     |
| 28. Stabilitas Politik dan Keamanan | 30. Reformasi Birokrasi |

### PRIORITAS KHUSUS

Asian Games dan Asian Para Games

Perubahan Iklim

Pemerataan

Tata kelola Pemerintahan yang Baik

[Dashed box] = contoh penajaman prioritas dari slide sebelumnya

[Dotted box] = *Highlight* prioritas pada slide selanjutnya

[Brown box] = Pengarusutamaan/Mainstreaming

# Highlight Proyek Prioritas Terintegrasi: Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

## PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA

### KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Danau Toba

### PROYEK PRIORITAS

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata

Pembentukan Kelembagaan Destinasi

Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata

Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)

Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)

Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata

Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestav dan Desa Wisata)

Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan

Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib

Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata

### KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Borobudur dan Sekitarnya

### PROYEK PRIORITAS

Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata

Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang

Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata

Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)

Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)

Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestav dan Desa Wisata)

Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan

Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib

Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata

### KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Mandalika

### PROYEK PRIORITAS

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata

Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata

Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)

Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)

Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata

Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestav dan Desa Wisata)

Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan

Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib

Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata

### KEGIATAN PRIORITAS

Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas\*

### PROYEK PRIORITAS

Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang

Pembentukan Kelembagaan Destinasi

Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata

Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)

Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan daya saing produk UKM sektor pariwisata (desa wisata dan homestay)

Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata

Penyediaan Regulasi dan Fasilitas untuk Mendorong Investasi di Destinasi Pariwisata

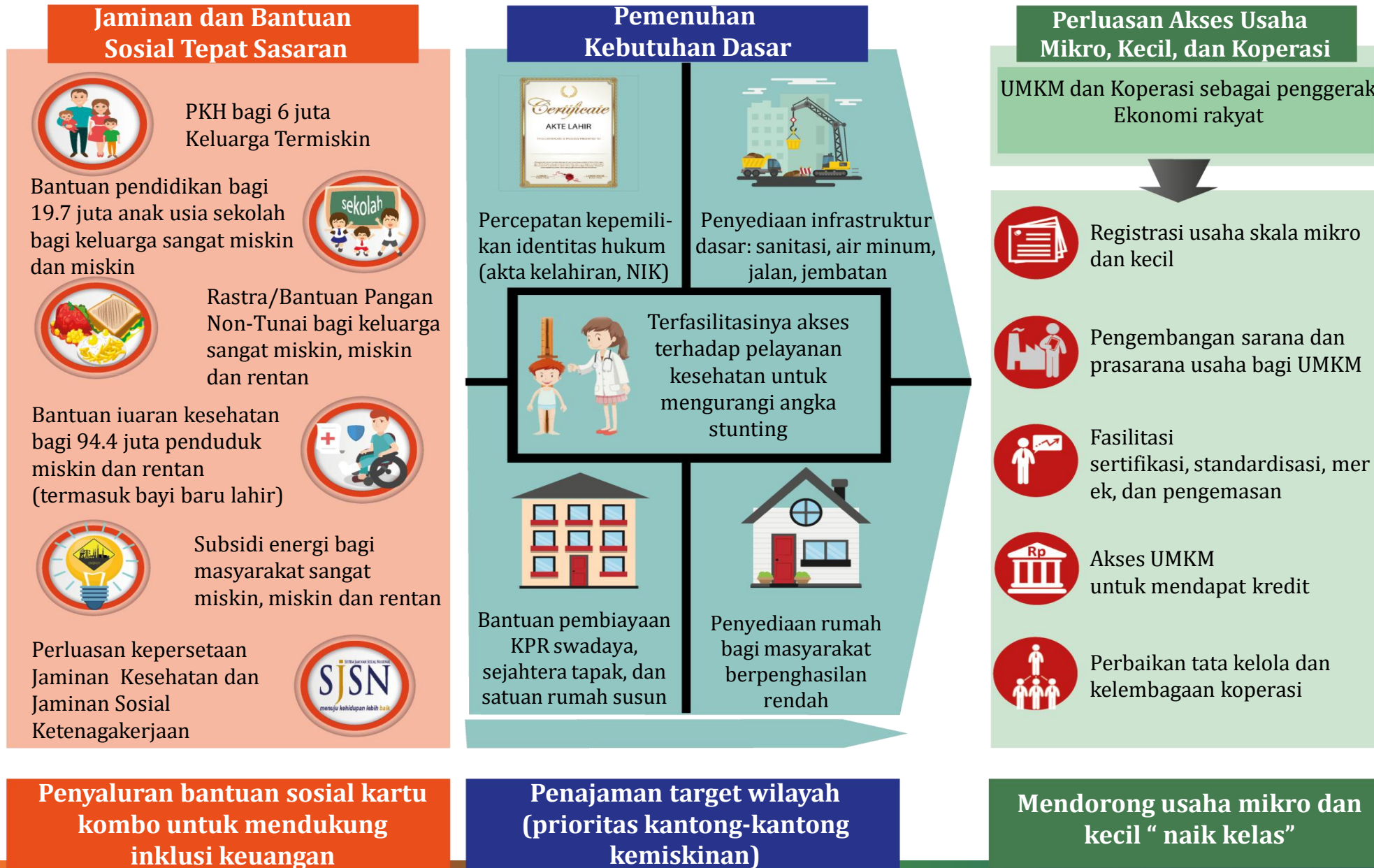
Penyediaan regulasi dan fasilitas untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata

Peningkatan aksesibilitas pariwisata (penyediaan sistem dan sarana transportasi darat, laut, udara terintegrasi)

**Pelaksana:**  
Kementerian Pariwisata, Kemenukeu, KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenLHK, Kem enKPP, POLRI, BNPB, Kemendi kbud, KemENES DM, BKPM, BPS, Pemda

\*7 destinasi prioritas lainnya yaitu Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Pulau Morotai, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung

# Highlight Kebijakan Prioritas Nasional: Penanggulangan Kemiskinan



# Prioritas Pembangunan Infrastruktur: Mendukung Keseluruhan Prioritas Nasional

## Penyediaan Pelayanan Dasar

- Akses Air Minum 100%
- Akses Sanitasi 100%
- Rasio Elektrifikasi 96.6%
- Akses Perumahan Layak Huni
- Aksesibilitas Perbatasan & Tertinggal
- Keamanan dan Keselamatan Transportasi
- Pengendalian Banjir

## Mendukung Sektor Unggulan

**Konektivitas**

**Tol Laut + intermoda**

Pengembangan Wilayah/Pusat Pertumbuhan

Pengembangan Wilayah/Pusat Pertumbuhan

**Tol Laut**

Kawasan Terbangun

Area Pelabuhan

Area Pelabuhan

Antarmoda

Antarmoda

Pelayaran

KTI / Tertinggal

**Pembangunan TIK:**

- Palapa Ring
- Rencana pita lebar: E-government, E-pendidikan, E-Kesehatan, E-commerce, E-logistik, E-pengadaan

**Pembangunan Energi 35 GW**

- Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini Vietnam 1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400 kWh/Kap.)

## Sektor Unggulan



Pertanian



Industri Pengolahan



Jasa & Pariwisata

## Infrastruktur Perkotaan

- Membangun Angkutan Massal Berbasis Jalan, Rel & Intermoda
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan

### Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan



<i>Avoid</i>	<i>Shift</i>	<i>Improve</i>
Jaringan yang Mendukung Efisiensi Perjalanan	Peningkatan Pangsa Angkutan Umum	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan



Energi untuk Transportasi Perkotaan



Mengembangkan infrastruktur perkotaan melalui pemanfaatan TIK untuk menuju kota cerdas

# 4

## Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018

## Dasar Hukum Yang Mendukung Perlunya Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah

1. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 258 ayat 3 mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
2. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan **koordinasi teknis pembangunan** antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan Daerah.
3. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 2 mengamanatkan bahwa **koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.**
4. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 263 Ayat 4 menyebutkan bahwa **RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.**

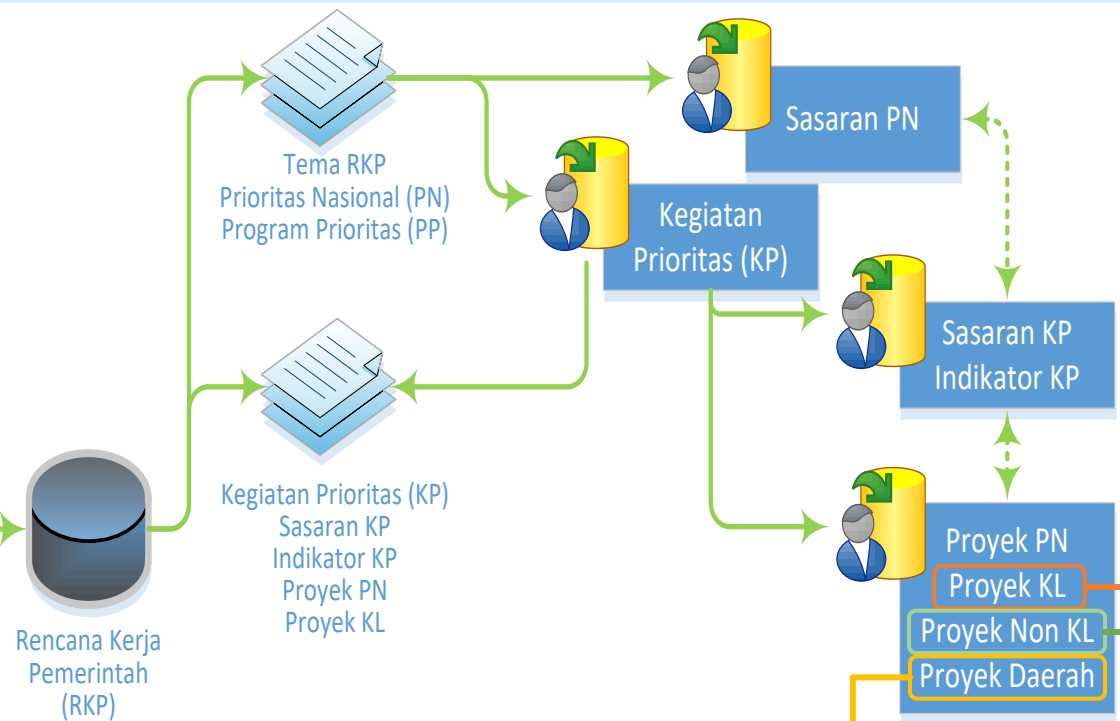
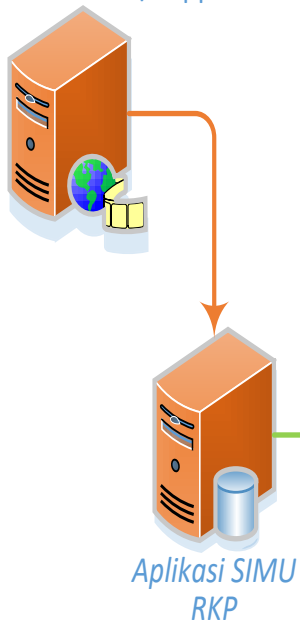
- Dalam UU No.25 Tahun 2004, disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk :
  - Mendukung **koordinasi antarpelaku pembangunan**
  - Menjamin **terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah.**
- Pencapaian **sasaran dan prioritas pembangunan nasional**,
  - Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri.
  - Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, spt pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni, dll.
  - Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka **sasaran prioritas pembangunan nasional** harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
- Saat ini,
  - Sinergi dan integrasi perencanaan antar pusat dan daerah belum sepenuhnya terwujud, karena tidak seluruh perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat mencerminkan kebutuhan di tiap-tiap daerah.
  - Disisi lain, perencanaan pembangunan di daerah yang perlu dukungan pemerintah pusat masih belum disusun berdasarkan isu strategis daerah yang sinergi dengan Prioritas Nasional.

- Penyusunan RKP 2018 didasarkan pada kebijakan *money Follows program* yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan *Tematik, Holistik, Integratif* dan *Spasial*.
- **Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran Pemerintah Provinsi** sebagai wakil pemerintah pusat di daerah **dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional** yang ditujukan untuk :
  - Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD);
  - Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD);
  - Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan).
- Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah → forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional) → sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RKP,
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional → forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional) → sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKP

## APLIKASI

## TATA KELOLA, PROSES, ISI SUBSTANSI DAN KETERKAITAN

e-Planning  
KemenPPN/Bappenas



Daftar Usulan Proyek Kementerian/Lembaga Pendukung Proyek Prioritas Nasional

No	Uraian Proyek	Lokasi	Satuan	Target						Pagu (juta Rupiah)						Aksi
				APBN 2017		Usulan 2018		Perkiraan		APBN 2017		Usulan 2018		Perkiraan		
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			

Sumber Pendanaan :  
APBN

Sumber Pendanaan :  
SWASTA

Sumber Pendanaan :  
APBD

### Penyelarasan RKPD - RKP

Daftar Usulan Proyek Daerah Pendukung Proyek Prioritas Nasional

No	Nama Proyek	Lokasi	Target						Satuan	Pagu (juta Rupiah)						Aksi
			APBD 2017		Usulan 2018		Perkiraan			APBD 2017		Usulan 2018		Perkiraan		
			2017	2018	2019	2020	2021	2017		2018	2019	2020	2021			

**SIMLARAS RKP**

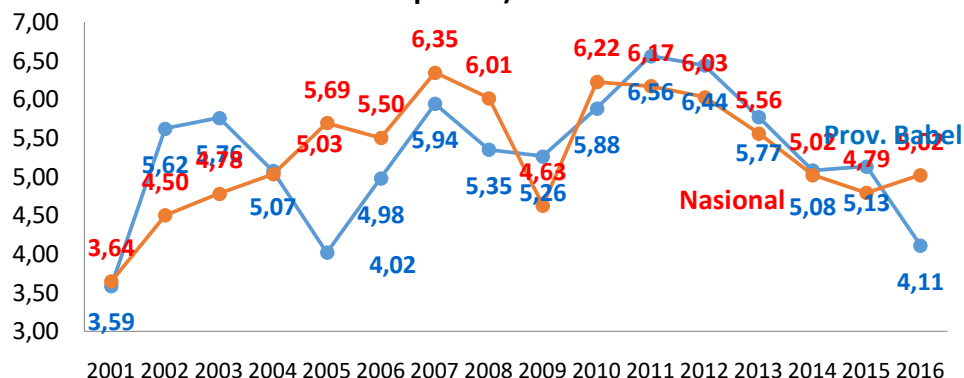
Daftar Usulan Proyek Non Kementerian/Lembaga Pendukung Proyek Prioritas Nasional

No	Nama Proyek	Lokasi	Target						Satuan	Pagu (juta Rupiah)						Aksi
			APBN 2017		Usulan 2018		Perkiraan			APBN 2017		Usulan 2018		Perkiraan		
			2017	2018	2019	2020	2021	2017		2018	2019	2020	2021			

**5**

**Prioritas Nasional Rancangan Awal RKP  
2018 di Provinsi Kep. Bangka Belitung**

Laju PDRB Provinsi Kep. Bangka Belitung Vs. PDB (dalam persen)



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalkulasi Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,4-6,1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Kep. Bangka Belitung diharapkan dapat tumbuh sebesar **5,03 – 5,30** persen\*, dengan tingkat kemiskinan sebesar **4,42** persen\*, dan tingkat pengangguran sebesar **2,10** persen\*.

Keterangan: \*) Proyeksi dalam Rancangan Awal

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kep. Bangka Belitung didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi total sebesar **67,6** persen. Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan keempat sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kep. Bangka Belitung.

No	Provinsi	Tingkat Kemiskinan				Jumlah Kabupaten dengan kemiskinan >= 10% tahun 2015
		Realisasi*)		Proyeksi Target		
		2015	2016	2017	2018	
1	Aceh	17,08	16,43	16,38	15,86	22
2	Sumatera Utara	10,53	10,27	9,62	9,18	23
3	Sumatera Barat	7,31	7,14	6,39	6,03	2
4	Riau	8,42	7,67	7,73	7,40	4
5	Jambi	8,86	8,37	7,97	7,57	4
6	Sumatera Selatan	14,25	13,39	13,16	12,81	16
7	Bengkulu	17,88	17,03	16,99	16,75	9
8	Lampung	14,35	13,86	13,27	12,84	13
9	Kep. Bangka Belitung	5,4	5,04	4,80	4,42	-
10	Kep. Riau	6,24	5,84	5,72	5,26	1

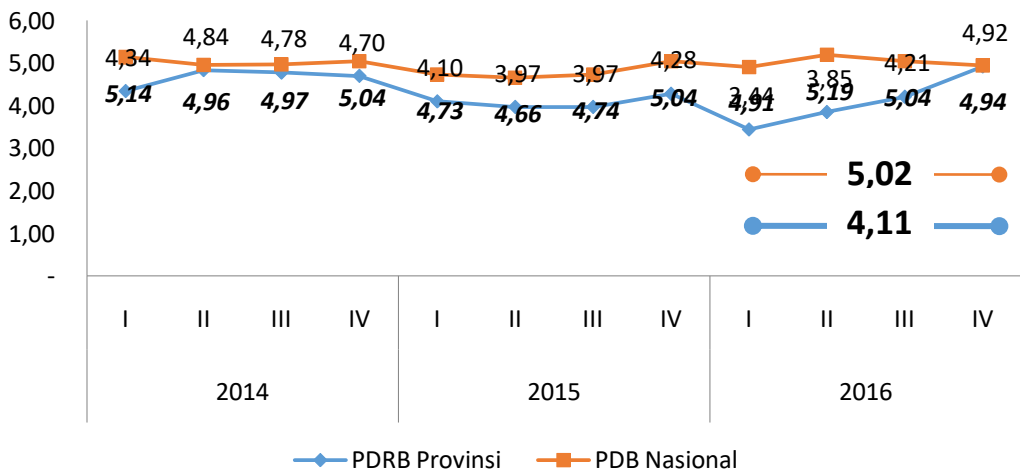
Keterangan: \*) Realisasi angka kemiskinan bulan September

Prov. Kep. Bangka Belitung	Share ADHB						Growth ADHK		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,15	17,31	17,87	18,40	19,22	19,68	6,85	9,22	5,86
2 Pertambangan dan Penggalian	17,09	16,67	15,36	14,09	13,52	12,69	-0,64	1,99	1,74
3 Industri Pengolahan	25,80	25,27	24,33	23,99	22,85	21,13	3,45	1,30	1,35
4 Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,05	0,07	0,08	4,80	9,29	5,77
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	4,19	4,95	5,74
6 Konstruksi	7,12	7,17	7,76	8,21	8,36	8,68	8,96	4,00	5,54
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,27	13,41	13,64	13,24	13,43	14,10	5,76	4,44	4,07
8 Transportasi dan Pergudangan	3,27	3,30	3,47	3,70	3,78	4,04	7,23	5,96	5,78
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,09	2,09	2,19	2,29	2,34	2,39	6,89	7,47	3,42
10 Informasi dan Komunikasi	1,63	1,55	1,56	1,53	1,51	1,54	8,97	6,85	7,34
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	1,51	1,61	1,79	1,77	1,78	16,68	5,26	4,35
12 Real Estat	2,78	2,88	3,06	3,18	3,26	3,25	7,98	7,72	2,86
13 Jasa Perusahaan	0,24	0,24	0,26	0,27	0,27	0,28	6,80	7,01	4,02
14 Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,49	4,88	4,94	5,20	5,40	5,78	7,55	7,33	9,78
15 Jasa Pendidikan	1,99	2,02	2,20	2,33	2,42	2,70	9,98	7,06	9,75
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	1,02	1,07	1,10	1,12	1,17	7,31	5,98	6,23
17 Jasa lainnya	0,59	0,59	0,61	0,63	0,66	0,70	6,84	7,95	8,12
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,20</b>	<b>4,67</b>	<b>4,08</b>

# Kondisi Ekonomi Provinsi Kep. Bangka Belitung (1/2)

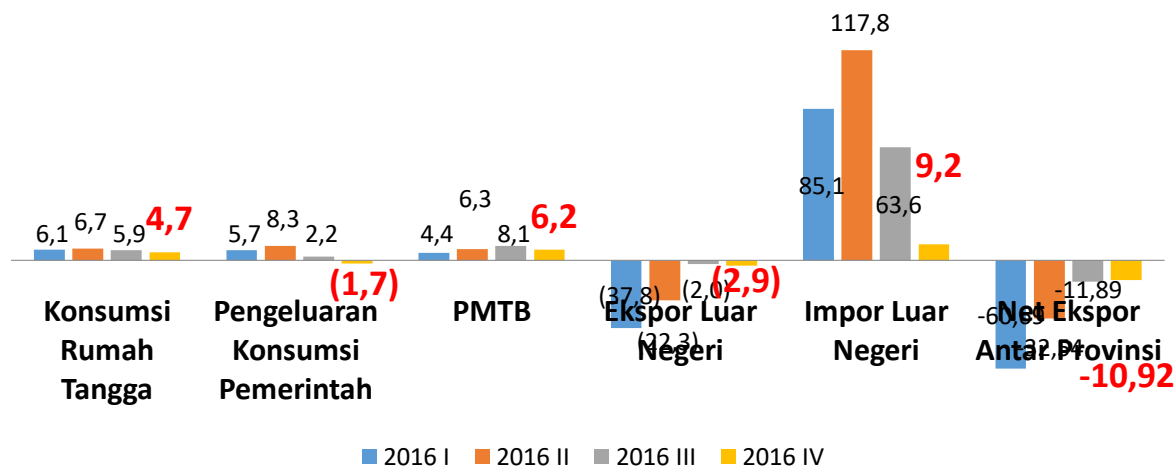
- Dalam 3 tahun terakhir, ekonomi Babel selalu tumbuh di bawah nasional. Tingginya impor merupakan sinyal yang baik karena implementasi proyek infrastruktur dan juga *smelter* timah baru. Perbaikan juga didorong oleh ekspor walaupun masih berkontraksi namun perbaikan harga CPO, Karet dan timah turut mendorong pertumbuhan industri dan tambang di TW-IV 2016.
- Dari sisi sektoral, selain sektor yang disebut di atas adalah peningkatan sektor pengadaan listrik yang tumbuh tinggi. Peningkatan ini tidak lain adalah upaya PLN untuk meningkatkan jumlah pengguna listrik di Babel dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tenaga listrik di daerah yang sebelumnya tidak terjangkau listrik.

## Pertumbuhan Ekonomi (y-o-y, Persen)



Sumber: BPS

## Pertumbuhan Sisi Pengeluaran (y-o-y, Persen)



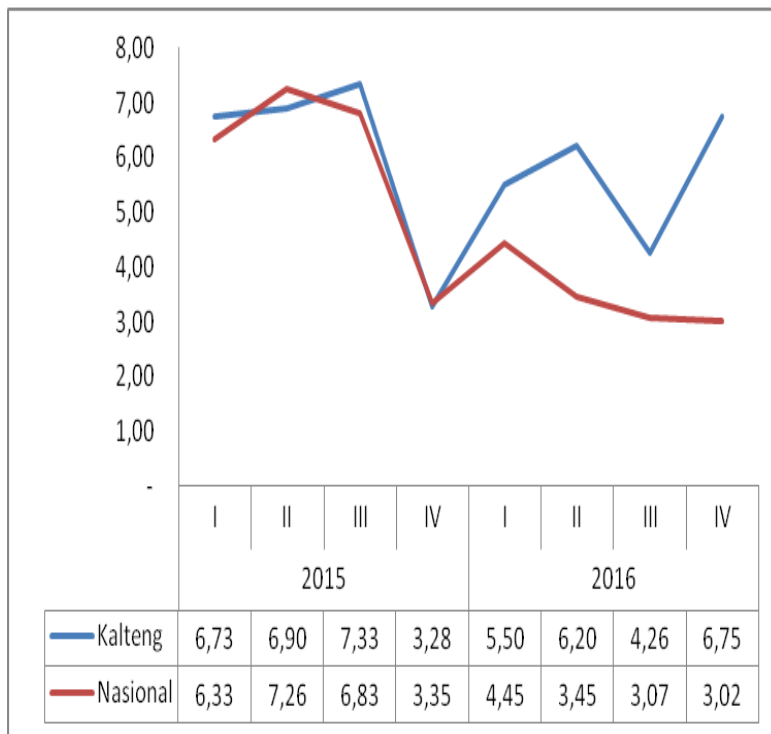
## Pertumbuhan Sisi Produksi (y-o-y, Persen)

Uraian	2016				
	I	II	III	IV	Total
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,3	4,4	3,3	3,2	4,3
Pertambangan dan Penggalian	-2,8	-1,5	2,6	3,7	0,5
Industri Pengolahan	0,2	1,1	3,1	5,8	2,6
Pengadaan Listrik dan Gas	9,8	15,1	15,5	9,5	12,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, Daur Ulang	8,7	6,2	4,3	3,1	5,5
Konstruksi	5,3	7,7	7,9	6,5	6,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,8	5,3	5,1	5,4	5,1
Transportasi dan Pergudangan	9,1	6,1	3,2	4,0	5,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,7	3,7	6,9	6,0	4,8
Informasi dan Komunikasi	10,0	9,9	9,9	7,0	9,2

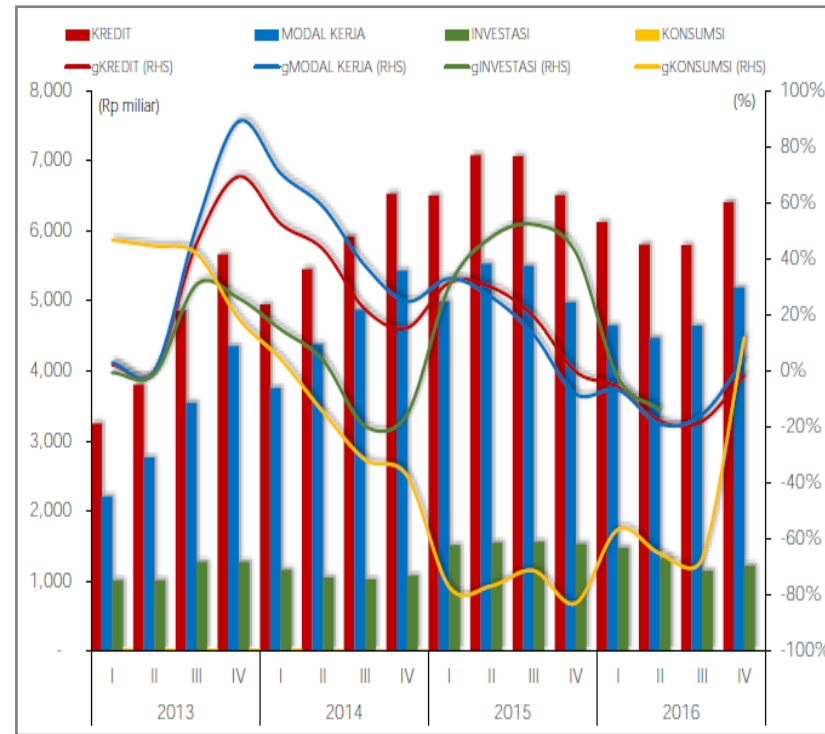
# Kondisi Ekonomi Provinsi Kep. Bangka Belitung (2/2)

- Inflasi Bangka Belitung meningkat tinggi sebesar 6,75 persen lebih tinggi dari inflasi nasional dan rentang target inflasi  $4,0 \pm 1,0$  persen. Sebagai provinsi kepulauan, transportasi menjadi sangat krusial terutama faktor cuaca, gelombang air laut yang dapat menyebabkan melambungnya biaya logistik serta juga ada gangguan terhadap pasokan karena gagal panen di sentra produksi.
- Perkembangan kredit korporasi pada TW-IV 2016 mengalami peningkatan karena mulai berjalannya lagi sektor pertambangan dan perkebunan. Secara umum NPL masih stabil di bawah 5,0 persen, namun NPL konstruksi meningkatkan tinggipadahal sebelumnya dalam tren yang menurun, kemungkinan hal ini akibat penundaan dana transfer sehingga agak terganggu arus kas perusahaan.

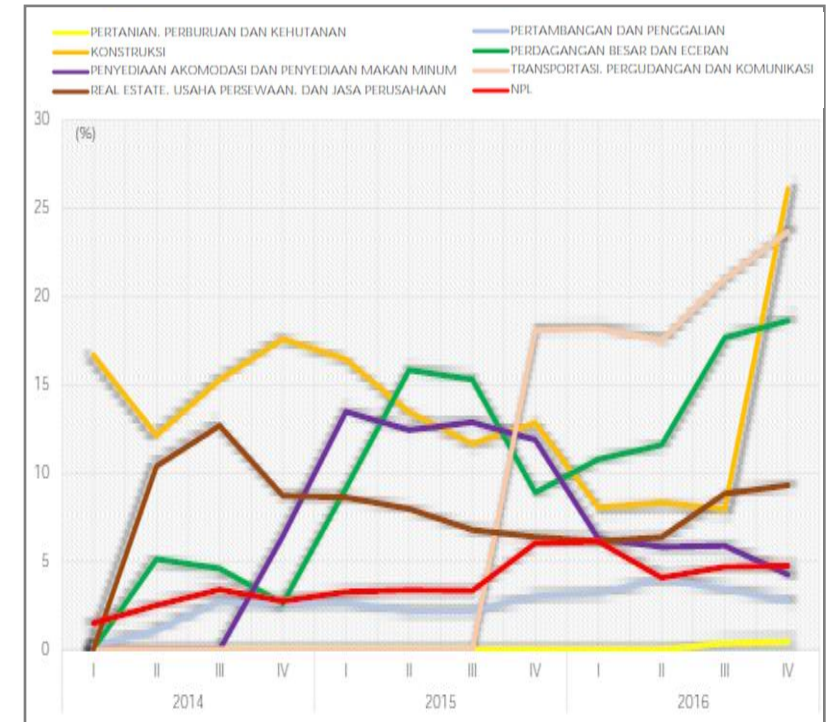
## Inflasi, IHK (y-o-y)



## Perkembangan Kredit Korporasi



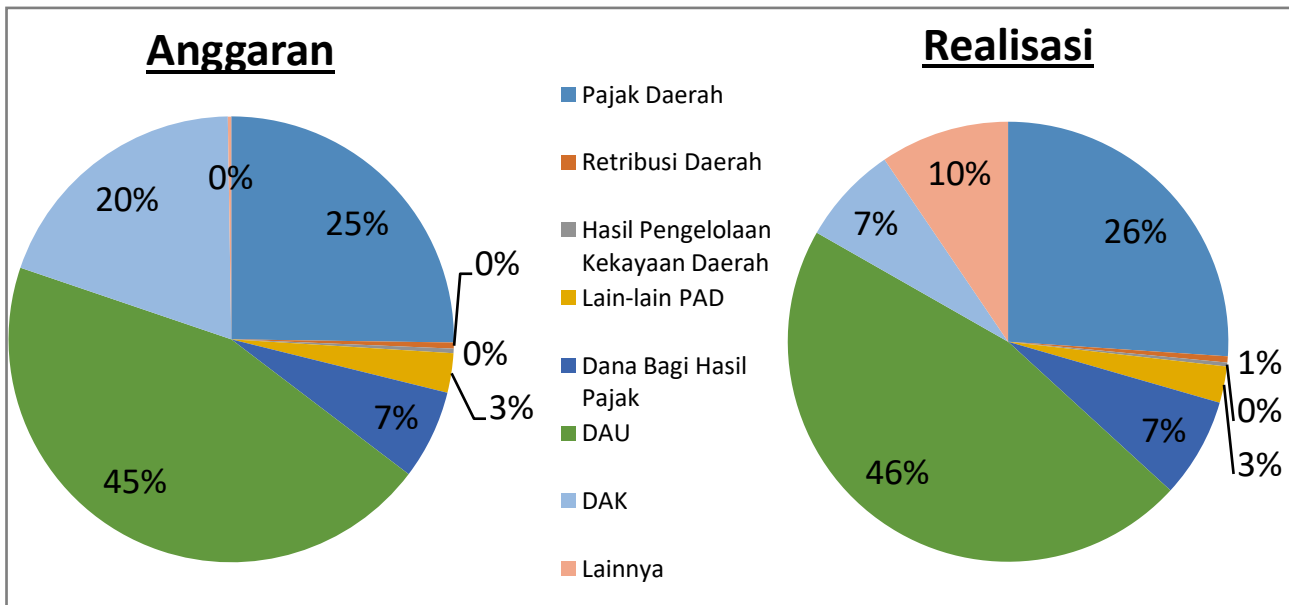
## NPL kredit Korporasi (UMKM/Non UMKM)



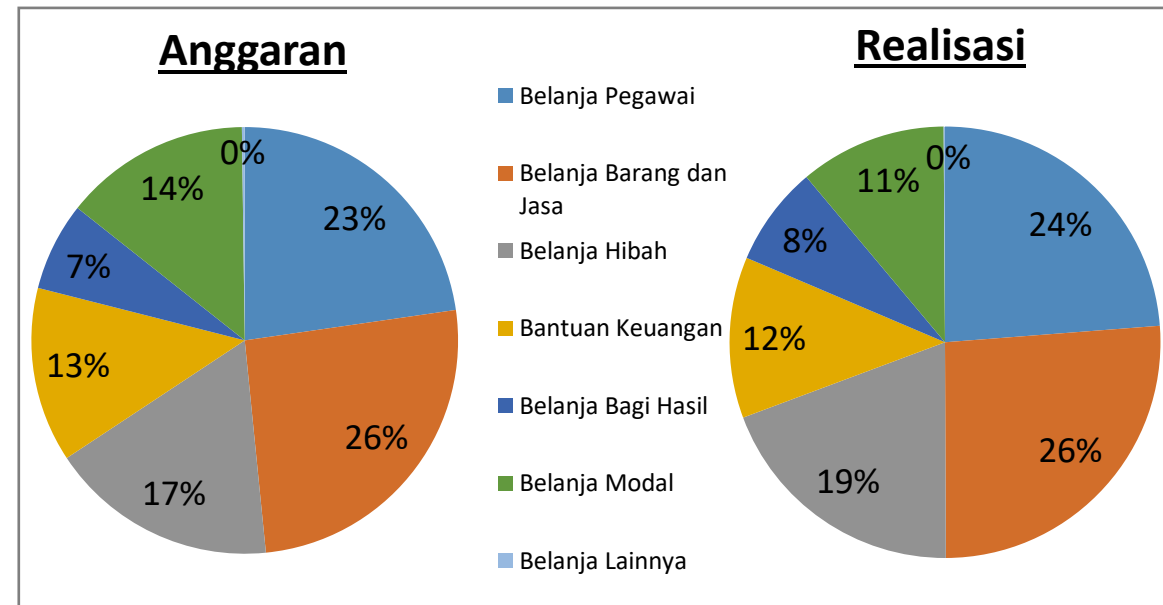
# Kondisi Fiskal Provinsi Kep. Bangka Belitung

- Provinsi Babel masih mengandalkan dana perimbangan seperti DAU dan DAK namun di sisi pendapatan asli daerah secara proporsi meningkat. Tingginya realisasi diakibatkan adanya dana otsus dan kemungkinan adanya perubahan nomenklatur di anggaran.
- Untuk belanja pemda relatif sudah mengikut yang sudah dianggarkan. Belanja modal di Babel belum mendapatkan porsi yang signifikan, masih berat pada belanja pegawai dan barang jasa yang cukup besar porsinya. Seiring perlambatan ekonomi, peran pemerintah diharapkan mampu memberikan insentif terutama investasi pemerintah untuk menggerakkan kembali/menstimulus sektor swasta agar bangkit. Rendahnya porsi belanja modal dikhawatirkan anggaran diserap bukan untuk belanja yang produktif dan berkualitas.

**Proporsi Realisasi dan Pendapatan APBD Bangka Belitung (Persen)**



**Proporsi Anggaran dan Belanja APBD Bangka Belitung (Persen)**

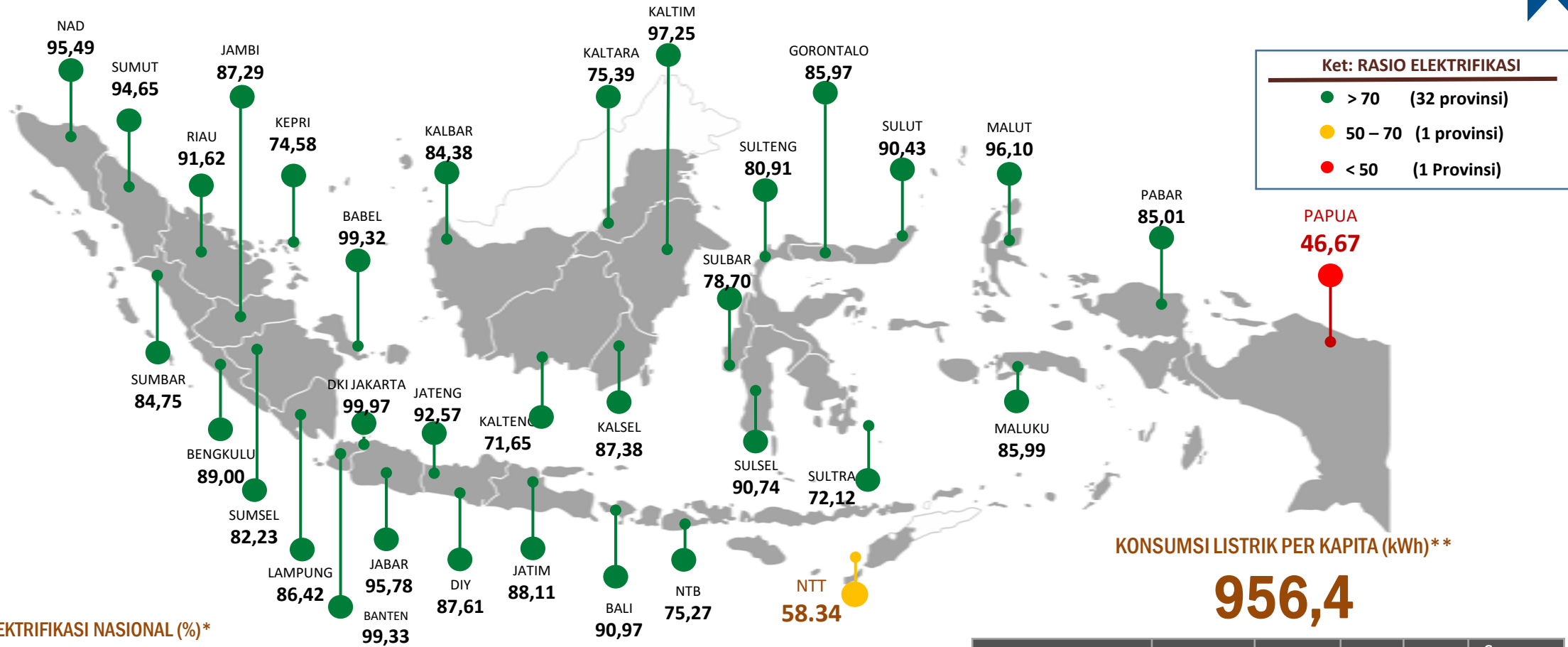


- Proyek Percepatan Pengembangan **Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Kelayang**.
  - Pembangunan Pengembangan Bandara Udara Hanandjoeddin
  - Pembangunan Waduk Gunung Tajam,
  - Rekonstruksi struktur jalan Tanjung Pandan – Sp. Empat Sujuk
  - Pembangunan sarpras pariwisata di Kawasan Tanjung Kelayang
- Proyek Pendukung **Konektivitas**
  - Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Sp. Empat Sujuk (Akses Bandara),
  - Pengembangan Pelabuhan Tj. Pandan
  - Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Liat Pongok

Percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung kelayang dan kegiatan pendukung prioritas konektivitas nasional, dan berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan Provinsi Bangka Belitung

# Capaian Rasio Elektrifikasi dan Konsumsi Listrik Perkapita 2016

## Rasio Elektrifikasi

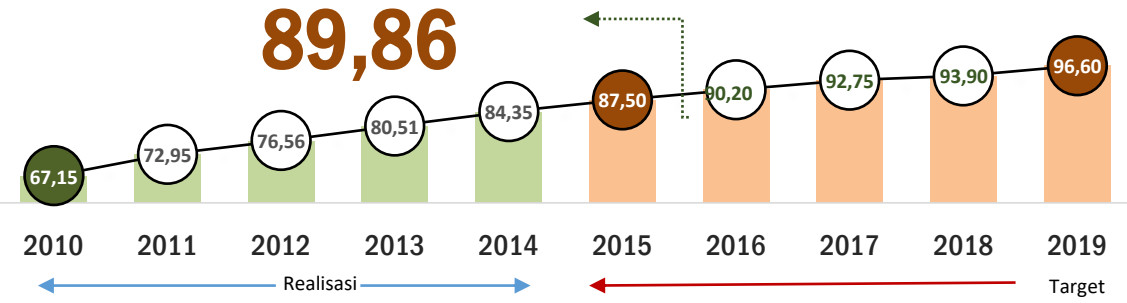


KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA (kWh)\*\*

**956,4**

RASIO ELEKTRIFIKASI NASIONAL (%)\*

**89,86**



Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)	2014 baseline	2015	2016	2017	Sasaran Akhir RPJMN 2019
Target	843	914	985	1.058	1.200
Capaian	843	909,9	956,4*		

\*\*Perkiraan capaian

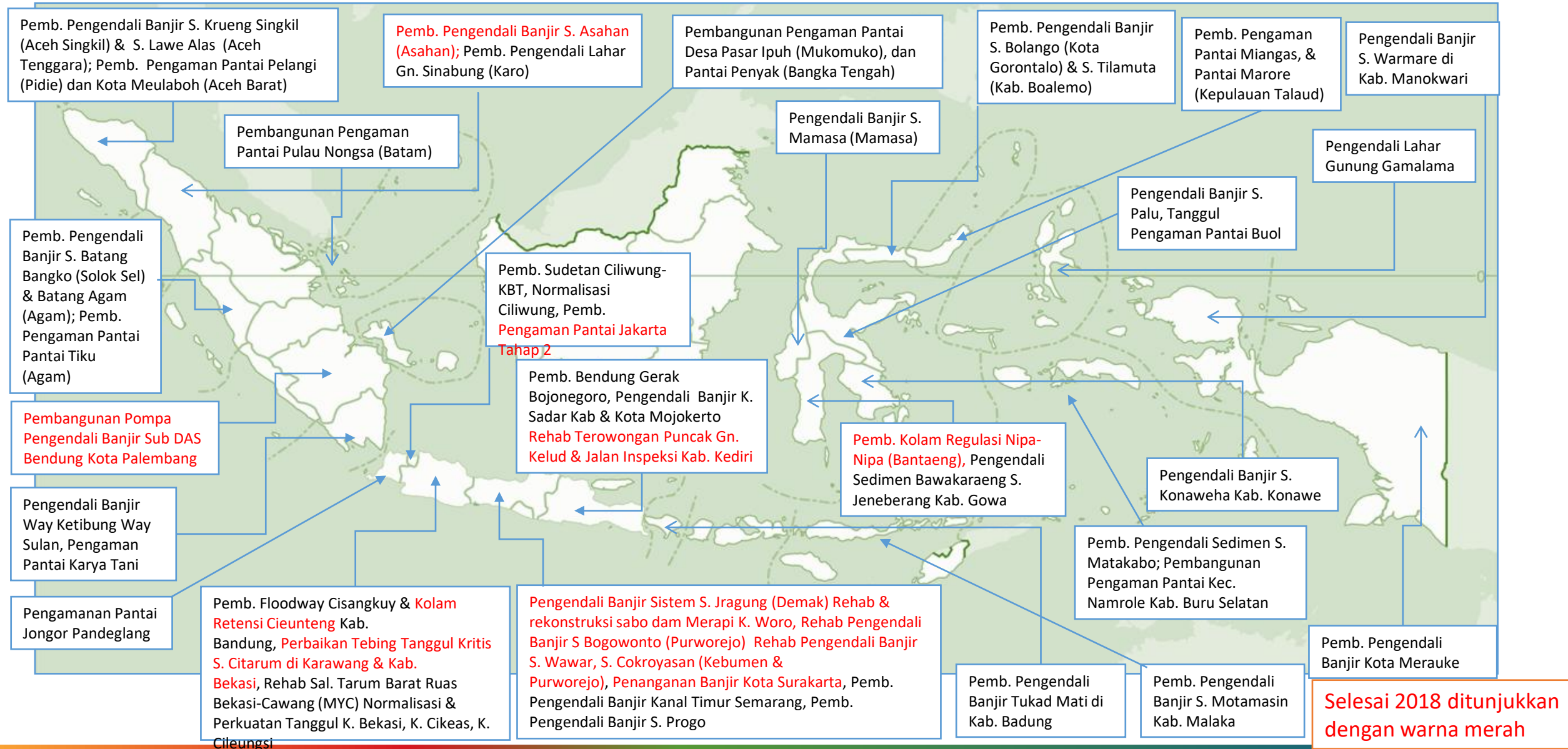
Sumber : Ditjen Ketenagalistrikan KESDM

\*per September 2016



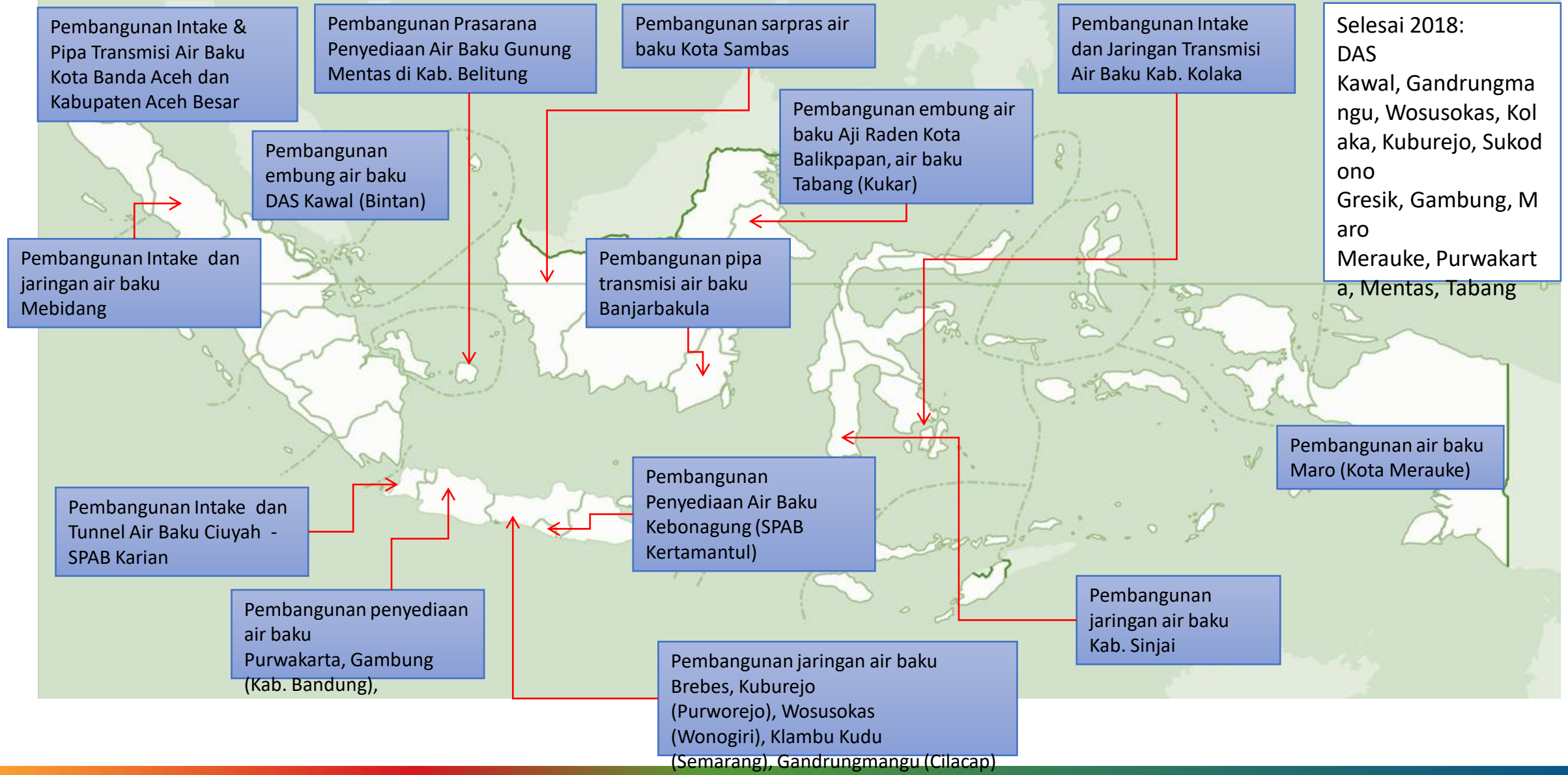
# Kegiatan Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2018

## Pengendalian Banjir

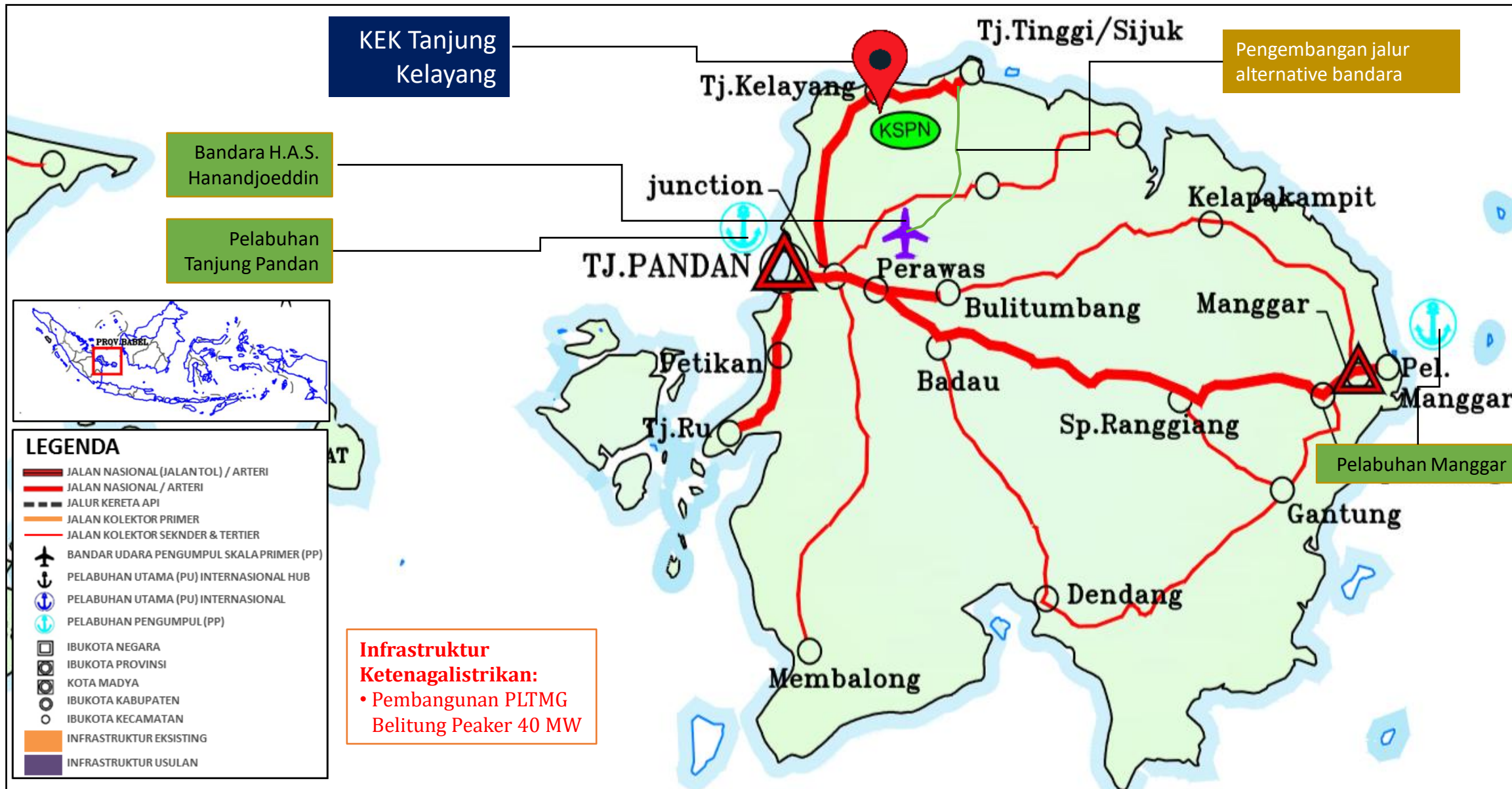


# Kegiatan Prioritas Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Tahun 2018

## Kedaulatan Pangan



# Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang



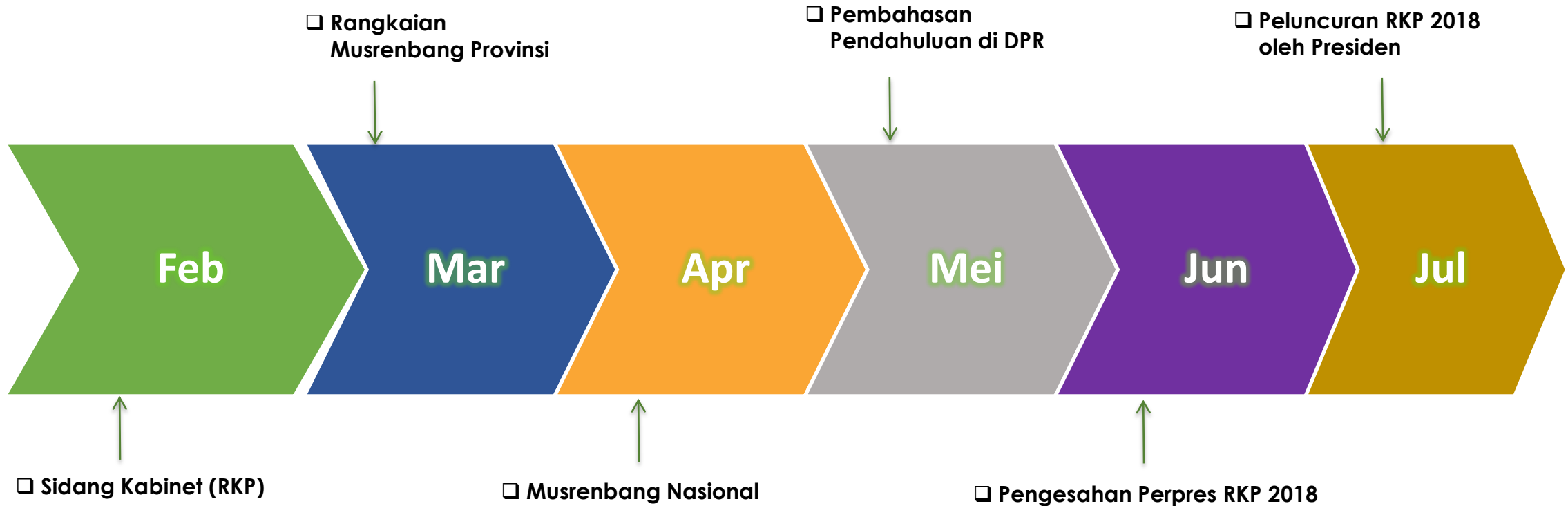
No.	Infrastruktur Eksisting	Kapasitas Infrastruktur	Aksesibilitas terhadap Kawasan	Catatan/Rekomendasi
1	<b>P. Tanjung Pandan (PP)</b>	Lapangan penumpukan: 34.612 m <sup>2</sup>	Terhubung ke Jalan kolektor primer dengan waktu perjalanan ± 30 – 50 menit	Direkomendasikan karena dapat menjadi alternative jalur lintas antar pulau yang mendukung kegiatan pariwisata di Tj. Kelayang
2	<b>Bandara H.A.S. Hanandjoeddin</b>	2250 m x 45 m	Terkoneksi dengan Tj. Kelayang dengan jalan kolektor primer dengan waktu tempuh ± 55 menit	Sebagai jalur udara utama menuju Tj. Kelayang yang saat ini dalam proses pengembangan
3	P. Manggar	Pelabuhan Pengumpul	Berjarak ± 2 jam dari Tj. Kelayang melalui jalan kolektor primer	Lokasi jauh dari Tj. Kelayang dan tidak secara langsung mendukung KEK sehingga perlu kajian lebih lanjut
4	P. Dendang	Pelabuhan pengumpan lokal	Berjarak ± 1.5 jam dari Tj. Kelayang	Perlu dikembangkan sebagai jalur alternative laut namun lokasi tidak secara langsung menghubungkan Tj. Kelayang dan lokasi berdekatan dengan pelabuhan manggar
5	Jalan Tj. Kelayang – Bandara(Tj. Kelayang – Sp. Lima – Perawas – Bandara)	Lebar jalan ± 8 m	Merupakan jalan kolektor primer yang saat ini menjadi jalan utama dari bandara	Diperlukan peningkatan jalan Tj. Kelayang – Bandara menjadi jalan arteri namun perlu kajian lebih lanjut karena kecepatan masih di atas 40 Km/jam

No.	Usulan RKP 2018	Catatan/Rekomendasi
1	Pemeliharaan Jalan Tj.Ru – Tj. Pandan – Tj. Tinggi	Merupakan kegiatan rutin pemeliharaan jalan, tidak perlu direkomendasikan
2	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Liat Pongok	Dapat memperluas jaringan wisata namun tidak secara langsung mendukung Tj. Kelayang
3	Pelebaran Jalan Petikan - Pilang	Dapat meningkatkan kapasitas jalan akses ke Tj. Kelayang. Akan tetapi berada di selatan bandara dan pelabuhan utama sehingga tidak direkomendasikan
4	<b>Pengembangan bandara H.A.S. Hanandjoeddin</b>	Pengembangan kapasitas darat dan udara dalam progress
5	Pengembangan Pelabuhan Manggar	dapat dikembangkan sebagai alternative jalur laut namun tidak secara langsung mendukung KEK sehingga perlu kajian lebih lanjut
6	Pengembangan pelabuhan Dendang	Lokasi pelabuhan berdekatan dengan pel. Manggar ± 1.5 jam sehingga tidak direkomendasikan
7	<b>Rekonstruksi/Peningkatan struktur jalan Tanjung Pandan- Sp. Empat Sujuk (Akses Bandara)</b>	Direkomendasikan karena bisa menjadi jalan alternative menuju Tj. Kelayang yang berjarak lebih dekat ± 40 menit

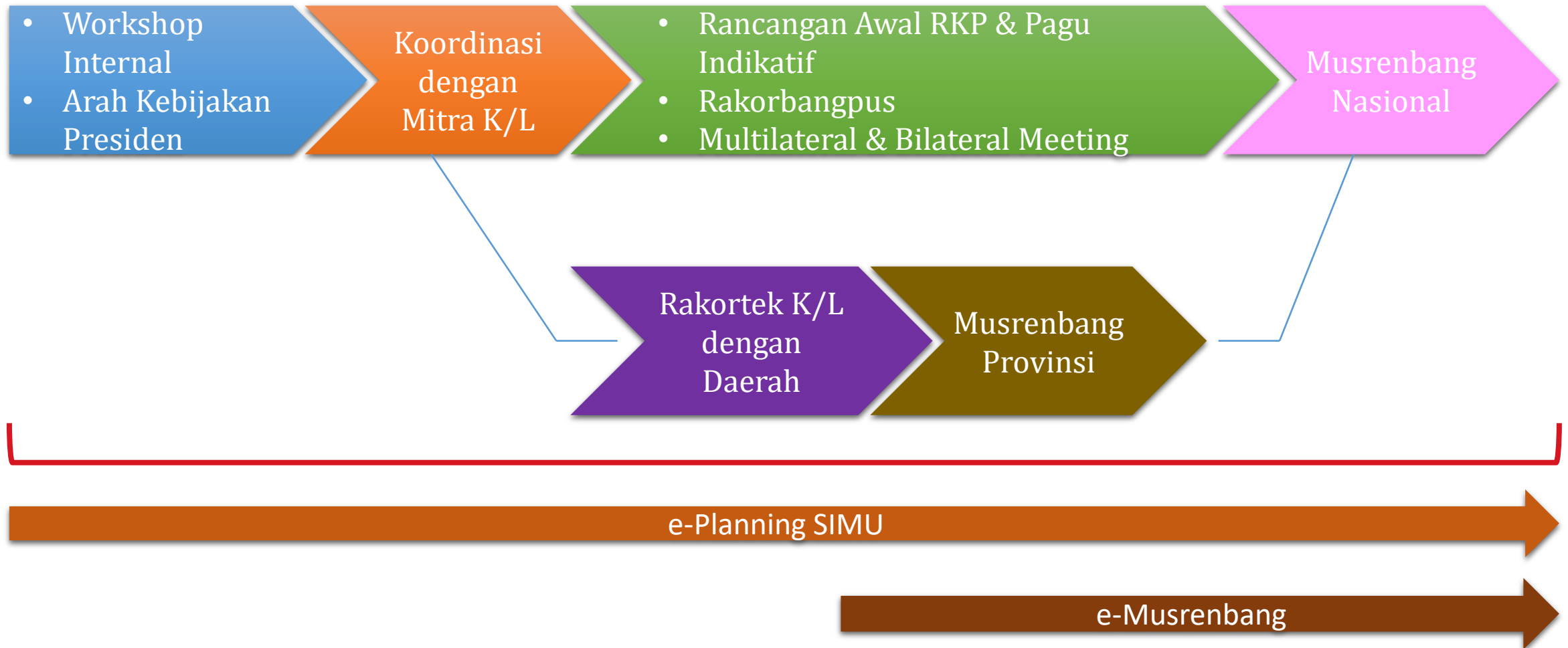
# 6

## Penutup

# Tahapan Penyusunan RKP 2018 (Desember 2016 - Juli 2017)

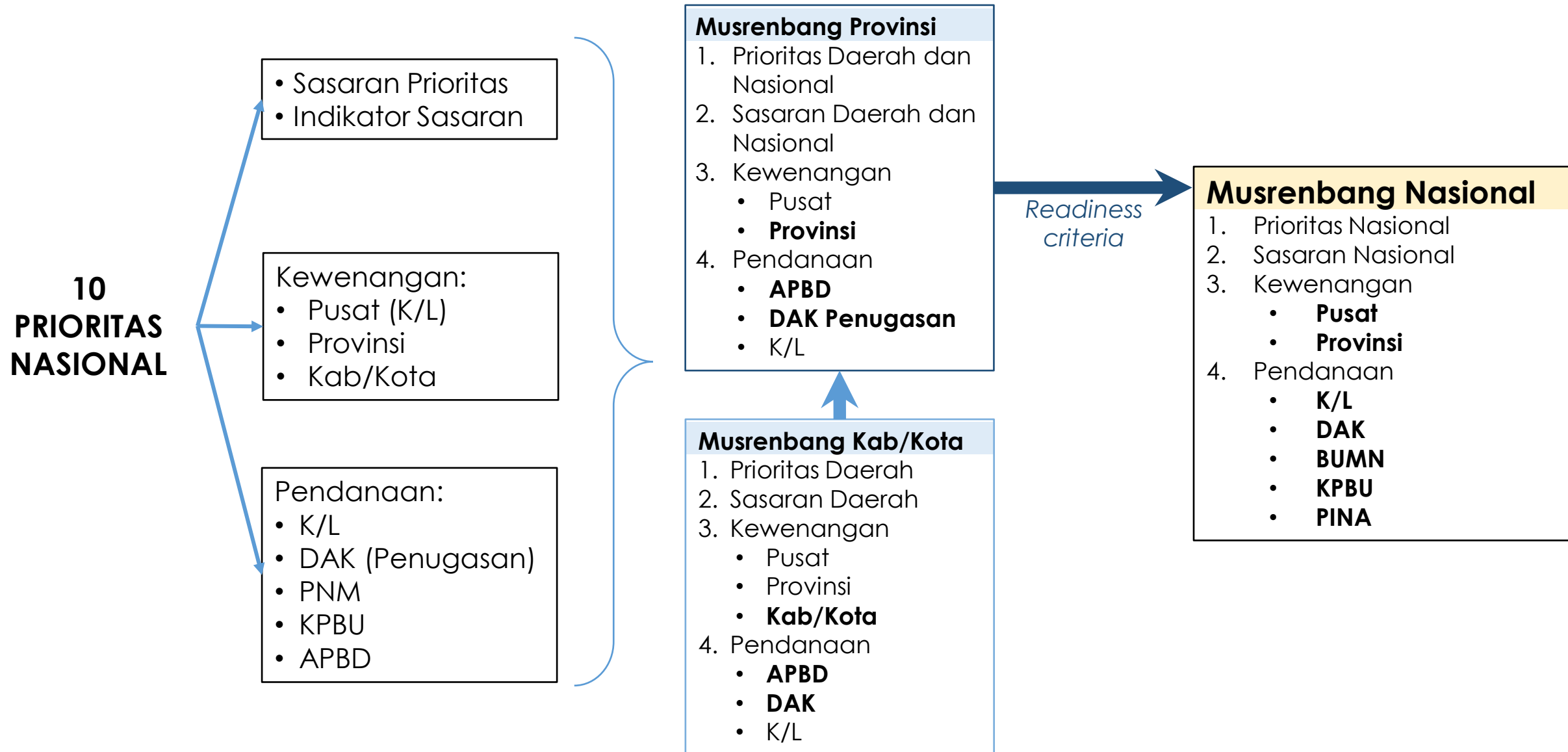


# Proses Utama Penyusunan RKP 2018 sampai Bulan April



# Musrenbang sebagai Forum Penyelarasan RKP dan RKPD

Koridor *Money Follow Program* dan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, Spasial



- ❑ **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional** adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan. Dalam **pencapaian sasaran** dan **prioritas pembangunan nasional**, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll. Selain itu juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka **sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan**.
- ❑ Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Bangka Belitung perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan:
  - ❑ Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan)
  - ❑ Perkuatan DAK penugasan dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional
- ❑ Seluruh hasil kesepakatan pelaksanaan rangkaian Musrenbang Provinsi Bangka Belitung agar dapat digunakan dalam pembahasan Rakortek Pusat dan Daerah serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2018.

**7**

# Lampiran

## PRIORITAS NASIONAL : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

### PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) (DARI 10)

#### Kegiatan Prioritas : Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang

Proyek Prioritas Nasional	Proyek KL	Instansi Pelaksana	Program	Kegiatan	Output	Lokasi
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Pengembangan Bandara Udara Hanandjoeddin	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Peningkatan Kapasitas Bandar Udara	Kab. Belitung
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Pembangunan Waduk Gunung Tajam (400 liter/detik) (Multiyears)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Pembangunan sarana dan prasarana air baku	Kab. Belitung
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Pembangunan instalasi dan distribusi Water Treatment Plant (WTP) Waduk Gunung Tajam (400 liter/detik) (Multiyears)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Pembangunan sarana dan prasarana air baku	Kab. Belitung
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Pembangunan jaringan distribusi dari SPAM Sijuk ke lokasi KEK (20 liter/detik)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Pembangunan sarana dan prasarana air baku	Kab. Belitung
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 untuk Penyusunan RDTR di sekitar KEK	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Pemetaan Rupabumi dan Toponim	Peta Dasar Skala 1:5.000 untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI)	Kab. Belitung
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Pembangunan SMK Pariwisata	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan		Kab. Belitung

# Highlight Proyek Prioritas Nasional Indikatif\*)

## PRIORITAS NASIONAL : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

### PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) (DARI 10)

#### Kegiatan Prioritas : Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang

Proyek Prioritas Nasional	Proyek KL	Instansi Pelaksana	Program	Kegiatan	Output	Lokasi
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Belitung Peaker (40 Mw)	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		Kab. Belitung
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Pandan	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	Kab. Belitung
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Rekonstruksi struktur jalan Tanjung Pandan – Sp. Empat Sijuk	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Rekonstruksi Jalan	Kab. Belitung
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Penyediaan Peta Lingkungan Indonesia (LPI) Skala 1:10000	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai	Data batimetri dan garis pantai	Kab. Belitung
Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Pemanfaatan IG Terintegrasi untuk Penyusunan Skenario Pengembangan Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Pemetaan Tata Ruang dan Atlas		Kab. Belitung

\*) Disampaikan sebagai Rancangan Kegiatan Aksesibilitas dan disampaikan pula pada Rakortek minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2017

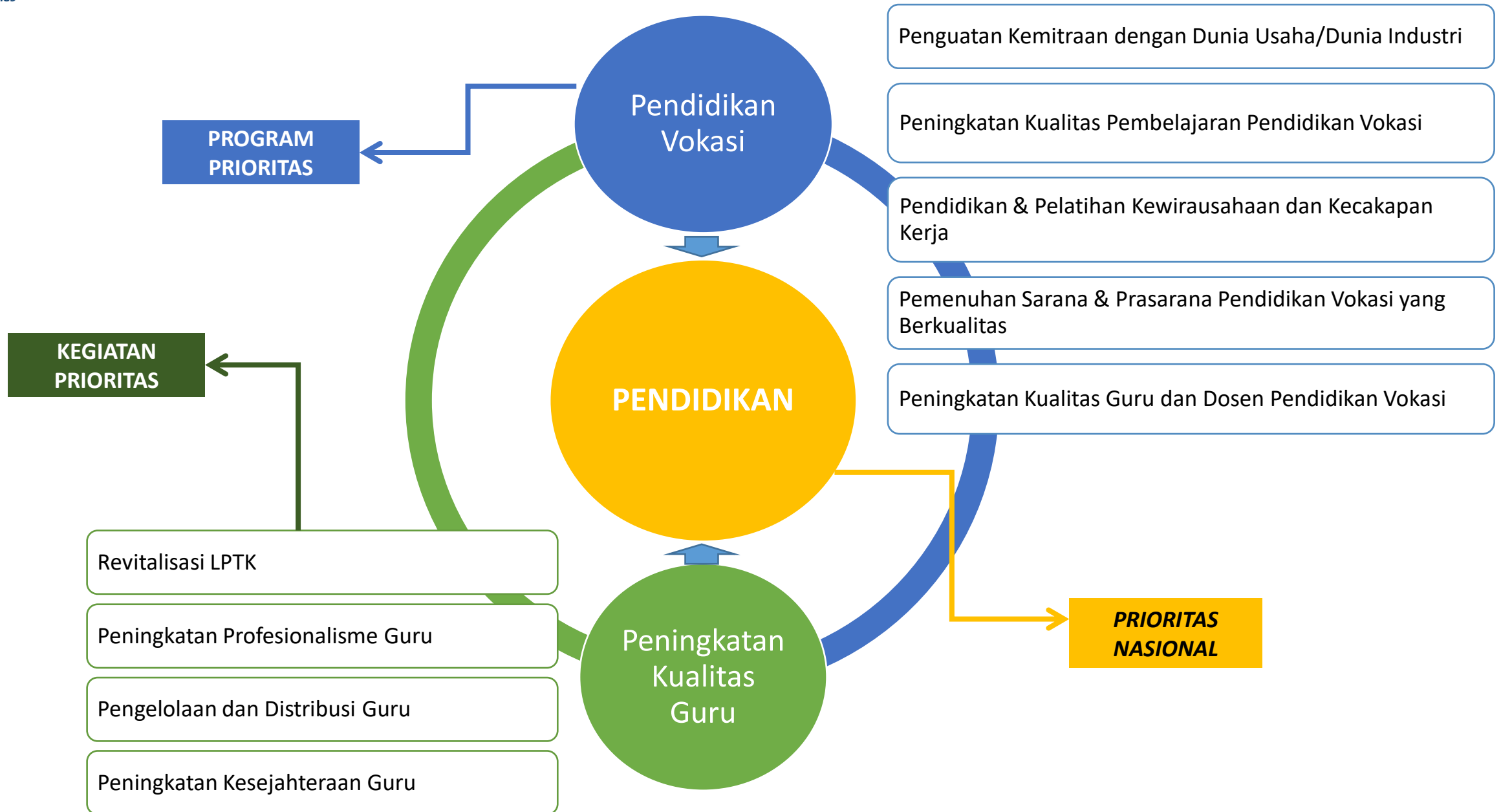
<b>PRIORITAS NASIONAL : INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN</b>						
<b>PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA)</b>						
<b>Kegiatan Prioritas : Konektivitas</b>						
<b>Proyek Prioritas Nasional</b>	<b>Proyek KL</b>	<b>Instansi Pelaksana</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Output</b>	<b>Lokasi</b>
Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pelebaran Jalan Tanjung Pandan - Sp. Empat Sijuk (Akses Bandara) (SBSN)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Rekonstruksi Jalan	Provinsi Bangka Belitung
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Pelabuhan Tj. Pandan	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	pembangunan fasilitas pelabuhan laut	Provinsi Bangka Belitung
<b>Kegiatan Prioritas : Aksesibilitas</b>						
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Daerah Tertinggal	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Liat Pongok	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru	Kab. Bangka Selatan
<b>PRIORITAS NASIONAL : PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>						
<b>PROGRAM PRIORITAS : AIR BERSIH DAN SANITASI</b>						
<b>Kegiatan Prioritas : Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi</b>						
Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi Terutama di Daerah dengan Akses Rendah	Penyediaan sarana air bersih di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Pembangunan Permukiman Transmigrasi		Kab. Bangka Barat



Kementerian PPN/  
Bappenas

# 1. Prioritas Nasional Pendidikan

# Prioritas Nasional Pendidikan



# Rancangan Program Prioritas Pendidikan Vokasi

## PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Proyek Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/Swasta	Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi	Proyek Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	Proyek Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi	Proyek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik Vokasi
Proyek Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta	Proyek Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi		Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi	
Proyek Pengembangan Sistem Insentif/Regulasi untuk Mendorong Peran Industri/Swasta dalam Pendidikan Vokasi	Proyek Peningkatan Penilaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi			
Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi				

# Rancangan Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru

## PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Revitalisasi LPTK	Peningkatan Profesionalisme Guru	Pengelolaan dan Distribusi Guru	Peningkatan Kesejahteraan Guru

Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Proyek Peningkatan Kapasitas LPTK	Proyek Peningkatan Kompetensi Guru	Proyek Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru	Proyek Penyediaan Tunjangan Guru
	Proyek Penilaian Kinerja Guru	Proyek Pemenuhan Guru di daerah 3T	Proyek Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan Guru
	Proyek Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru		
	Proyek Sertifikasi Guru		



## 2. PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN

# Prioritas Nasional Kesehatan



# Rancangan Program Prioritas: Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK		
Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Perbaiki Kualitas Gizi Ibu dan Anak	Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Penurunan Kematian Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	Penurunan <i>Stunting</i>	Pemenuhan JKN/KIS
		Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas
		Pemenuhan SDM kesehatan
		Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		
Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS	Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular	Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
Pengendalian Malaria		
Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ <i>Neglected Tropical Diseases</i>		

## PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PREVENTIF DAN PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT”

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Peningkatan lingkungan sehat	Peningkatan pemahaman hidup sehat	Peningkatan konsumsi pangan sehat
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat	Kampanye Hidup Sehat	Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat



### 3. PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

# PN Perumahan dan Permukiman



## PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK

### Kegiatan Prioritas

**Penciptaan Iklim Kondusif  
Penyediaan Rumah MBR**

### Kegiatan Prioritas

**Penataan Penyediaan  
dan Peningkatan  
Kualitas Perumahan  
MBR**

### Kegiatan Prioritas

**Fasilitasi Pembiayaan  
Perumahan MBR**

### Kegiatan Prioritas

**Peningkatan Kualitas dan  
Penyediaan Infrastruktur  
Dasar Permukiman**

### Proyek Prioritas

Reformasi administrasi  
pertanahan dan perizinan  
pembangunan perumahan

Peningkatan pembinaan dan  
pengawasan standar  
bangunan gedung

Pengembangan sistem  
informasi bantuan  
perumahan

### Proyek Prioritas

Penyediaan rumah susun  
beserta PSU

Penyediaan rumah khusus  
beserta PSU

Fasilitasi penyediaan  
rumah swadaya beserta  
PSU

### Proyek Prioritas

Fasilitasi pembiayaan  
perumahan sisi *demand*

Fasilitasi pembiayaan  
perumahan sisi *supply*

### Proyek Prioritas

Perencanaan perumahan dan  
kawasan permukiman

Pengembangan infrastruktur  
kawasan permukiman

Keterangan:

PSU: Prasarana Sarana Utilitas

MBR: Masyarakat Berpenghasilan Rendah

# Rancangan Program Prioritas: Air Bersih dan Sanitasi

## PROGRAM PRIORITAS AIR BERSIH DAN SANITASI

### Kegiatan Prioritas

**Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi**

### Proyek Prioritas

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat terkait air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah

Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang terintegrasi terutama di daerah dengan akses rendah

Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah

### Kegiatan Prioritas

**Peningkatan Ketersediaan Air Baku**

### Proyek Prioritas

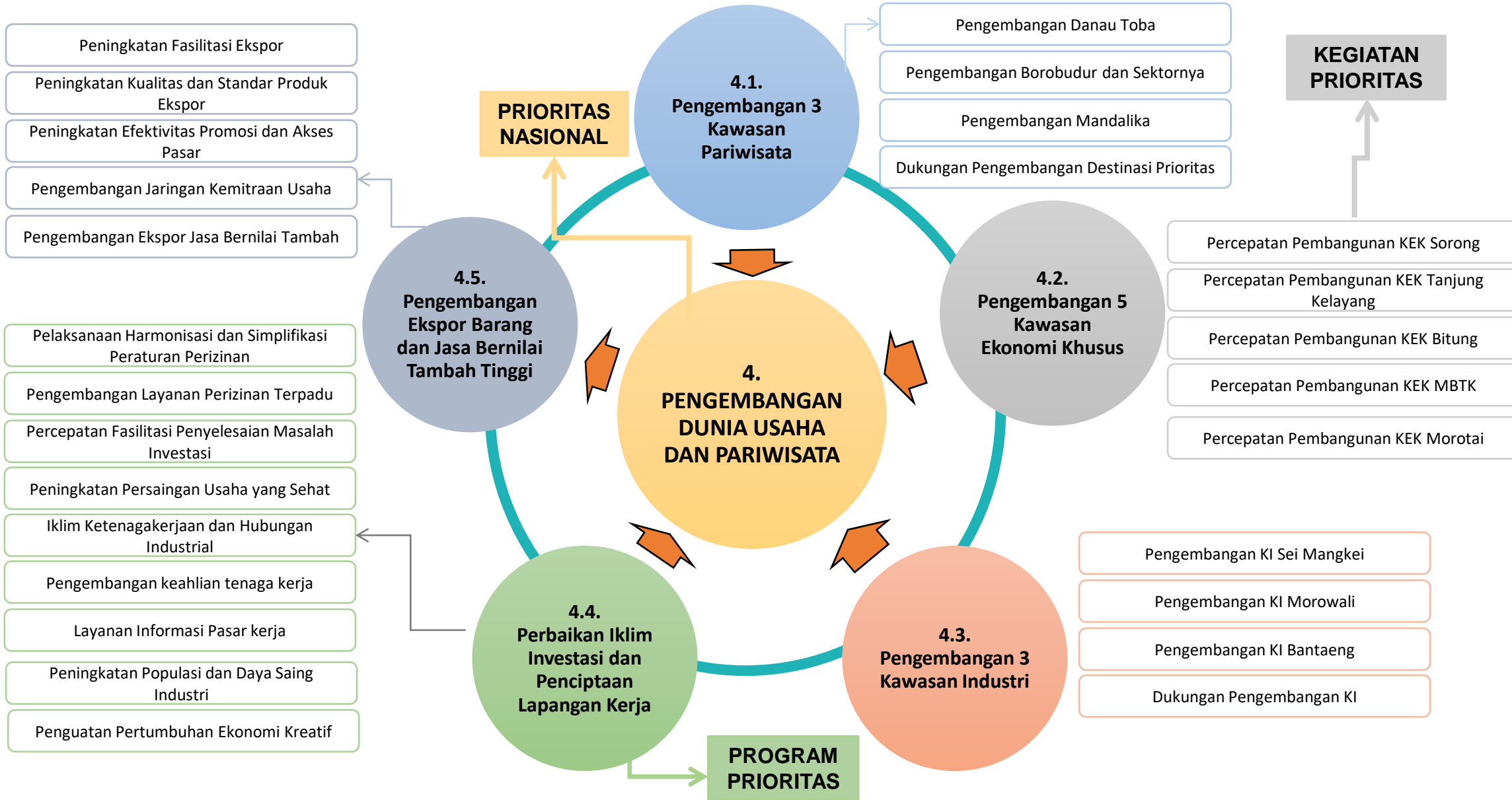
Jaga Air : Peningkatan ketahanan sumber daya air domestik di 15 DAS prioritas

Simpan Air : Peningkatan ketersediaan dan kuantitas air di kota-kota besar dan metropolitan



## 4. PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

# PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata



# Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

## PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Danau Toba	Pengembangan Borobudur dan Sekturnya	Pengembangan Mandalika	Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Pembangunan Infrastruktur Dasar	Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang
Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata	Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata	Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata	Pembentukan Kelembagaan Destinasi
Pembentukan Kelembagaan Destinasi	Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang	Pembentukan Kelembagaan Destinasi	Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata
Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata	Pembentukan Kelembagaan Destinasi	Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata	Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)
Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)	Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata	Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)	Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)
Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)	Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding)	Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)	Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata
Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata	Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling)	Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata	Penyediaan Regulasi dan Fasilitasi untuk Mendorong Investasi di Destinasi Pariwisata
Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)	Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)	Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata)	Penyediaan Statistik Pariwisata Nasional
Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan	Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan	Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan	
Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib	Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib	Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib	
Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata	Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata	Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata	

# Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus

## PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

<b>KEGIATAN PRIORITAS</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS</b>
Percepatan Pembangunan KEK Sorong	Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Percepatan Pembangunan KEK Bitung
<b>PROYEK PRIORITAS</b>	<b>PROYEK PRIORITAS</b>	<b>PROYEK PRIORITAS</b>
Percepatan Pembangunan KEK Sorong	Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	Percepatan Pembangunan KEK Bitung
<b>KEGIATAN PRIORITAS</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS</b>	
Percepatan Pembangunan KEK MBTK	Percepatan Pembangunan KEK Morotai	
<b>PROYEK PRIORITAS</b>	<b>PROYEK PRIORITAS</b>	
Percepatan Pembangunan KEK MBTK	Percepatan Pembangunan KEK Morotai	

# Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 3 Kawasan Industri

## PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI (KI)

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan KI Sei Mangkei	Pengembangan KI Morowali	Pengembangan KI Bantaeng	Dukungan Pengembangan Kawasan Industri
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI
Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi	Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi	Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi	Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi
Pembebasan Lahan	Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI	Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI	Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI
Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI	Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI	Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI	Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI
Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI	Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK	Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK	
Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK	Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI	Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI	
Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI		Penyediaan Insentif KI	

# Rancangan Program Prioritas: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (1)

## PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

### KEGIATAN PRIORITAS

Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan

### KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu

### KEGIATAN PRIORITAS

Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi

### KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat

### PROYEK PRIORITAS

Peningkatan peringkat EoDB

Harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi peraturan perizinan tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah

Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi

### PROYEK PRIORITAS

Pengembangan sistem perizinan nasional

Pembentukan PTSP dan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP daerah

### PROYEK PRIORITAS

Percepatan penyusunan RTRW dan RDTR khususnya di kawasan strategis

Penyelesaian pengaduan masalah investasi

Perkuatan Data dan Informasi Investasi

### PROYEK PRIORITAS

Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat

Pengawasan kegiatan usaha yang sesuai dengan mekanisme persaingan usaha yang sehat

Penegakan hukum terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat

# Rancangan Program Prioritas: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (2)

## PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri	Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif	Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja	Layanan Informasi Pasar Kerja
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Penguatan ekosistem dan daya tahan industri	Penguatan Ekosistem Pengembangan Ekonomi Kreatif	Percepatan Penyempurnaan UU Ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN)	Pembangunan bengkel pelatihan bersama ( <i>workplace</i> ) di 20 Kabupaten/Kota	Layanan Informasi Pasar Kerja di Kawasan Industri
Peningkatan desain, standardisasi mutu, kualitas produk	Peningkatan Akses Pembiayaan dan Layanan Keuangan	Kemitraan Peningkatan Kapasitas Pelaku Hubungan Industrial	Skema Dana Pengembangan Pelatihan	
Penumbuhan populasi industri	Penguatan Rantai Nilai dan Peningkatan Akses Pasar	Penguatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		
Pembaharuan permesinan industri	Dukungan Infrastruktur bagi Pelaku Ekonomi Kreatif			
Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri				

# Rancangan Program Prioritas: Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa (1)

## PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

### KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Fasilitas Ekspor

### KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Kualitas dan Standar  
Produk Ekspor

### KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Efektivitas Promosi  
dan Akses Pasar

### PROYEK PRIORITAS

Publikasi dan sosialisasi  
mengenai perundingan  
perdagangan internasional

Pengembangan sistem fasilitas  
pembiayaan perdagangan

Kerjasama pengembangan ekspor

Fasilitasi kebijakan perdagangan

### PROYEK PRIORITAS

Peningkatan kualitas produk  
UMKM dan koperasi

Penyediaan sistem informasi  
ketentuan standard di negara  
mitra

Peningkatan infrastruktur mutu

### PROYEK PRIORITAS

Peningkatan citra produk Indonesia  
(branding)

Penyediaan informasi dan analisa  
pasar ekspor

Promosi dagang dalam dan luar  
negeri

Peningkatan akses pasar

# Rancangan Program Prioritas: Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa (2)

## PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

### KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Jaringan  
Kemitraan Usaha

### PROYEK PRIORITAS

Fasilitasi kemitraan rantai  
nilai/pasok

### KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Ekspor Jasa  
Bernilai Tambah

### PROYEK PRIORITAS

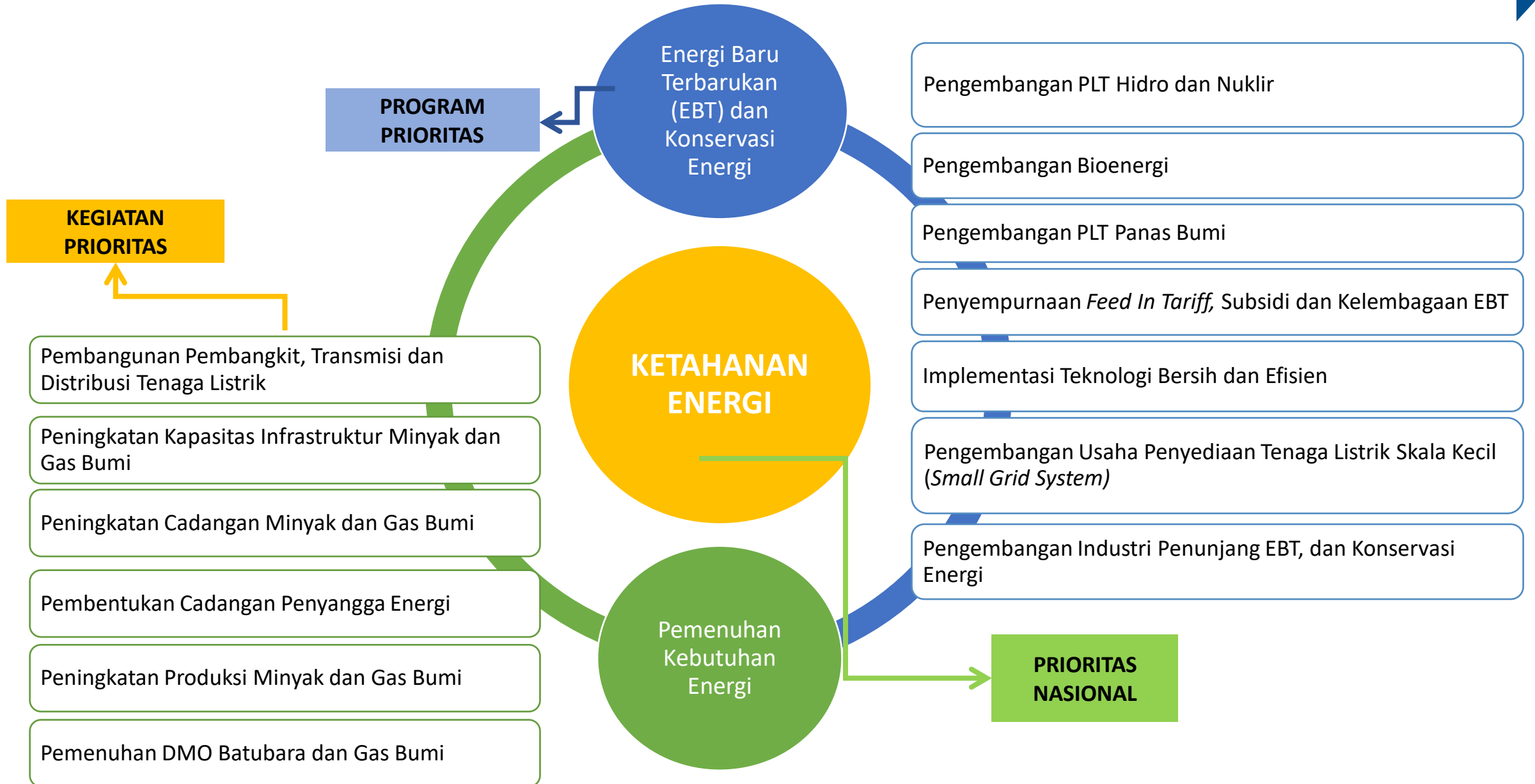
Pendampingan pasar jasa

Kebijakan pendukung  
pengembangan jasa



## 5. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI

# Ketahanan Energi



# Rancangan Program Prioritas: Ketahanan Energi (1/2)

## PROGRAM PRIORITAS ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DAN KONSERVASI ENERGI

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro dan Nuklir	Pengembangan PLT Panas Bumi	Pengembangan Bioenergi	Penyempurnaan <i>Feed-In-Tariff</i> , Subsidi dan Kelembagaan EBT	Implementasi Teknologi Energi Bersih dan Efisien	Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil ( <i>Small Grid System</i> )	Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi
<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>
Pembangunan PLT berbasis Hidro	Peningkatan Capacity Building Panas Bumi	Pembangunan Infrastruktur Bioenergi	Penyempurnaan Regulasi <i>Feed-in-Tariff</i> EBT	Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Cerdas	Regulasi dan Mekanisme Penetapan Pembangunan <i>Small Grid System</i> secara Komprehensif	Penyusunan Regulasi Insentif untuk Industri EBT dan Konservasi Energi Dalam Negeri
Pengembangan PLT Nuklir/Thorium	Pembangunan Research Center Panas Bumi	Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE)	Peningkatan Capacity Building bagi Pemerintah Daerah untuk Efisiensi Energi		Pembangunan Sarana Pengujian Kualitas Aneka EBT
	Peningkatan Kualitas Data Cadangan Panas Bumi		Pembentukan Badan Usaha EBT	Penghematan Energi dan Air pada Bangunan/Gedung	Pembangunan Jaringan Tenaga Listrik Skala Kecil	Riset Teknologi EBT dan Konservasi Energi Bagi Industri Nasional
	Pembangunan PLTP					

# Rancangan Program Prioritas: Ketahanan Energi (2/2)

## PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN ENERGI

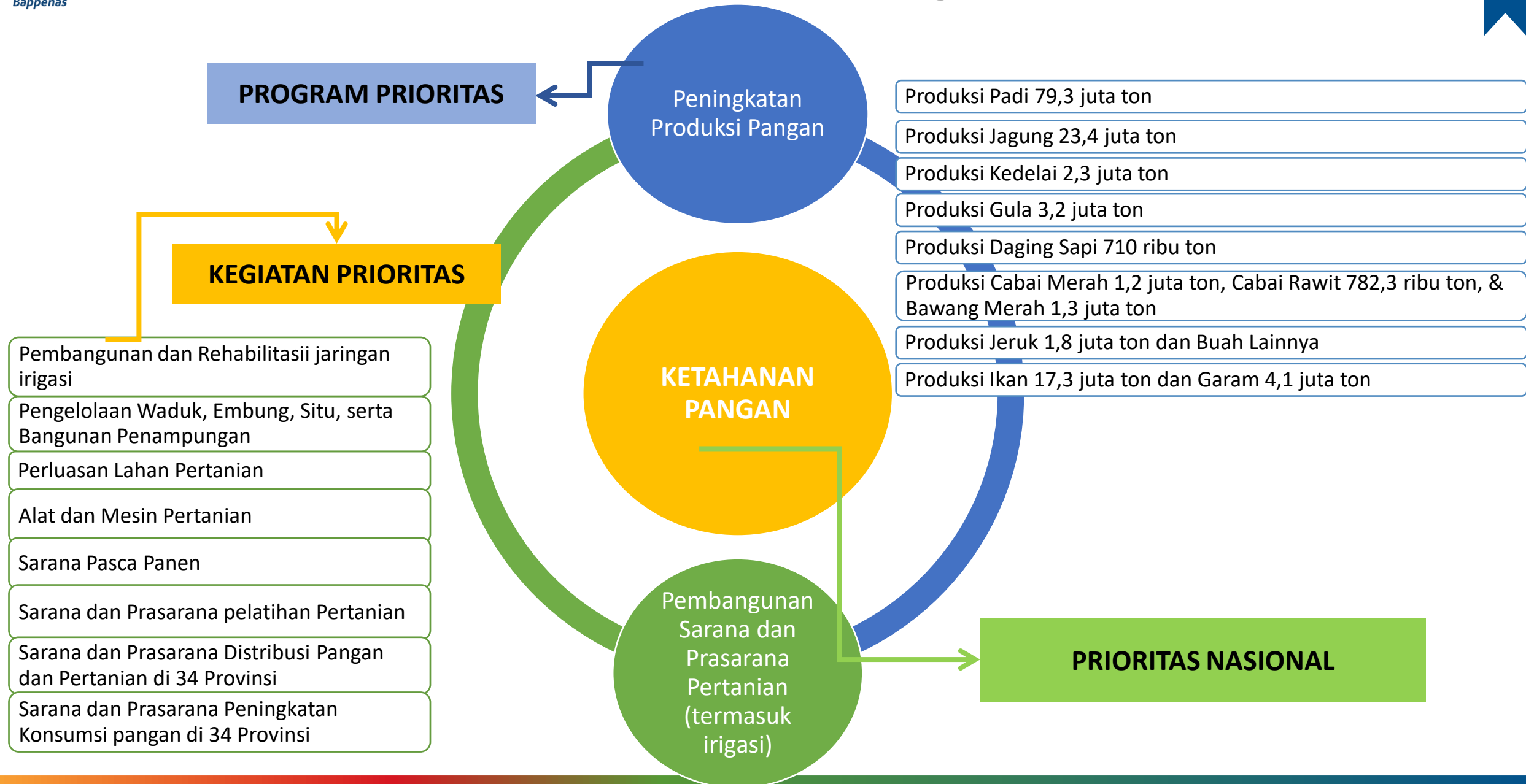
Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
<b>Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Pembentukan Cadangan Penyangga Energi</b>	<b>Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi</b>
<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>
Pembangunan pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induk	Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga	Eksplorasi minyak dan gas bumi	Pembangunan Cadangan Penyangga Energi	Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi	Penyediaan Alokasi Gas Domestik
Penetapan harga energi listrik dan penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran	Pembangunan Tangki Penvimanan BBM	Survei sumber daya migas konvensional dan non-konvensional		Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Non Konvensional	Pemantauan dan pengawasan penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu	Pembangunan Tangki Penvimanan LPG			Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Konvensional	Tata Kelola dan Penetapan Zonasi Penyediaan Batubara untuk PLTU dan Industri
	Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Nelavan			Penawaran WK Migas Non Konvensional	
	Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan			Peningkatan Daya Tarik Investasi Minyak dan Gas Bumi	
	Pembangunan LCNG/LNG			Penawaran WK Minyak dan Gas Bumi Konvensional	
	Fasilitasi Pembangunan FSRU/Regasifikasi On-shore/Liquefied Natural Gas Terminal			Peningkatan Pemanfaatan Teknologi untuk Eksplorasi Migas	
	Fasilitasi dan monitoring Pembangunan Kilang dan RDMP (Refinery Development Master Plan)			Penyempurnaan Regulasi Minyak dan Gas Bumi	
	Penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran				
	Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi				
	Pembangunan ruas pipa transmisi dan jaringan pipa				



Kementerian PPN/  
Bappenas

## 6. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN

# PN Ketahanan Pangan



# Rancangan Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan (1/2)

## PROGRAM PRORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

### KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Padi 79,3 juta ton

### PROYEK PRIORITAS

Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya padi di 15 provinsi

Bantuan benih pada padi jajar legowo di 15 provinsi

Penyediaan pupuk bersubsidi dan pendampingan padi di 15 provinsi

Asuransi dan bantuan puso padi di 15 provinsi

Penguatan penyuluhan padi di 15 provinsi

Penguatan statistik padi/beras di 15 provinsi

Penyediaan fasilitas dan pelatihan pertanian melalui Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)

### KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Jagung 23,4 juta ton

### PROYEK PRIORITAS

Pengembangan Sistem perbenihan jagung di 10 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya jagung di 10 provinsi

Bantuan benih pada jagung hibrida di 10 provinsi

Subsidi pupuk untuk jagung di 10 provinsi

Bantuan puso untuk jagung di 10 provinsi

Penguatan penyuluhan jagung di 10 provinsi

### KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Kedelai 2,3 juta ton\*

### PROYEK PRIORITAS

Pengembangan Sistem perbenihan kedelai di 10 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya kedelai di 10 provinsi

Bantuan benih kedelai di 10 provinsi

Bantuan puso untuk kedelai di 10 provinsi

Subsidi pupuk untuk kedelai di 10 provinsi

Penguatan penyuluhan kedelai di 10 provinsi

### KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Gula 3,2 juta ton

### PROYEK PRIORITAS

Pengembangan benih tebu

Perluasan areal budidaya tebu di DIY, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku Utara, Sulsel, NTB, Sulteng, dan Sultra

Pengembangan dan penelitian teknologi produksi tebu

Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

Ket : \* Kedelai merupakan komoditas pangan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di dalam RPJMN 2015-2019, tetapi disarankan untuk tidak diprioritaskan dalam alokasi pendanaan dikarenakan faktor iklim.

# Rancangan Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan (2/2)

## PROGRAM PRORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

### KEGIATAN PRIORITAS

**Produksi Daging Sapi  
710 ribu ton**

### PROYEK PRIORITAS

Penyediaan pakan ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Produksi Benih Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Penyediaan Bibit Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Penguatan Kelembagaan Pembibitan dan Produksi Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Percepatan peningkatan populasi ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi hewan di 13 sentra/kawasan sapi potong

Asuransi Sapi di 13 sentra/kawasan sapi potong

### KEGIATAN PRIORITAS

**Produksi Cabai Merah 1,2 juta ton, Cabai Rawit 782,3 ribu ton, dan Bawang Merah 1,3 juta ton**

### PROYEK PRIORITAS

Perluasan Kawasan Aneka Cabai di 9 provinsi dan bawang di 4 provinsi

Penyediaan Benih Bawang Merah dan Benih Cabai, diutamakan varietas lokal

Pengendalian OPT Hortikultura

### KEGIATAN PRIORITAS

**Produksi Jeruk 1,9 juta ton dan Buah lainnya**

### PROYEK PRIORITAS

Penyediaan benih buah di 8 provinsi

Perluasan Areal Budidaya Jeruk dan buah lainnya di 8 provinsi

Pengembangan teknologi varietas unggul lokal yang komersial

Pengendalian OPT Buah

### KEGIATAN PRIORITAS

**Produksi Ikan 17,3 juta ton dan garam 4,1 juta ton**

### PROYEK PRIORITAS

Peningkatan produksi perikanan tangkap di 11 WPP

Peningkatan produksi perikanan budidaya

Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan

Industrialisasi perikanan

Peningkatan Produksi garam

Konservasi Pesisir dan Laut (habitat ikan)

# Rancangan Program Prioritas : Sarana dan Prasarana Pertanian (1/2)

## PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pengelolaan waduk, embung, situ, serta bangunan penampung air lainnya	Perluasan lahan pertanian	Alat dan mesin pertanian
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan: berat-sedang-ringan	Pembangunan bendungan	Verifikasi luas sawah baku	Mengkaji kebutuhan dan skema pendanaan kredit untuk pengadaan Alsintan
Rehabilitasi bendung irigasi : berat-sedang-ringan	Pembangunan embung dan bangunan penampung lainnya.	Penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan RTDR yang memasukkan LP2B	Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen padi
Pembangunan Jaringan Irigasi permukaan		Optimasi lahan	Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen jagung
Pembangunan bendung irigasi		Cetak sawah	Penyaturan dan pemanfaatan bantuan Alsintan Budidaya Tebu di Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Sulsel, Sumsel
Pembangunan konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif.			

# Rancangan Program Prioritas: Sarana dan Prasarana Pertanian (2/2)

## PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

### KEGIATAN PRIORITAS

Sarana pasca panen

### PROYEK PRIORITAS

Revitalisasi penggilingan padi

Penyaluran alat pascapanen perkebunan

Pembangunan dan Fasilitas Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)

Pembangunan Bangsal Pascapanen dan teknik pengemasan

Pembangunan Cold Storage Hortikultura dan perikanan

Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan

### KEGIATAN PRIORITAS

Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi

### PROYEK PRIORITAS

Resi gudang

Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan

Fasilitas sarana dan prasarana kelembagaan pasar ternak

Revitalisasi pasar

Penguatan karantina pangan dan pertanian

### KEGIATAN PRIORITAS

Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi

### PROYEK PRIORITAS

Peningkatan keamanan dan mutu pangan

Penguatan kualitas konsumsi pangan

Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan



Kementerian PPN/  
Bappenas

## 7. PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

# Prioritas Nasional 7: Penanggulangan Kemiskinan



## PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah	Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial	Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan	Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat	Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS

### Penyaluran bantuan sosial melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan

Bantuan pendidikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK melalui KIP	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai di 98 kota dan 188 kabupaten	Penyaluran Bantuan PKH Secara Non Tunai	Subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA
Beasiswa Mahasiswa Miskin/Bidik Misi	Monitoring dan evaluasi terpadu JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Rastra)	Penyaluran Bantuan PKH Secara Reguler	Subsidi elpiji 3 kg
	Percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial melalui advokasi, sosialisasi, dan inovasi pendaftaran dan pembayaran iuran		Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	

## PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

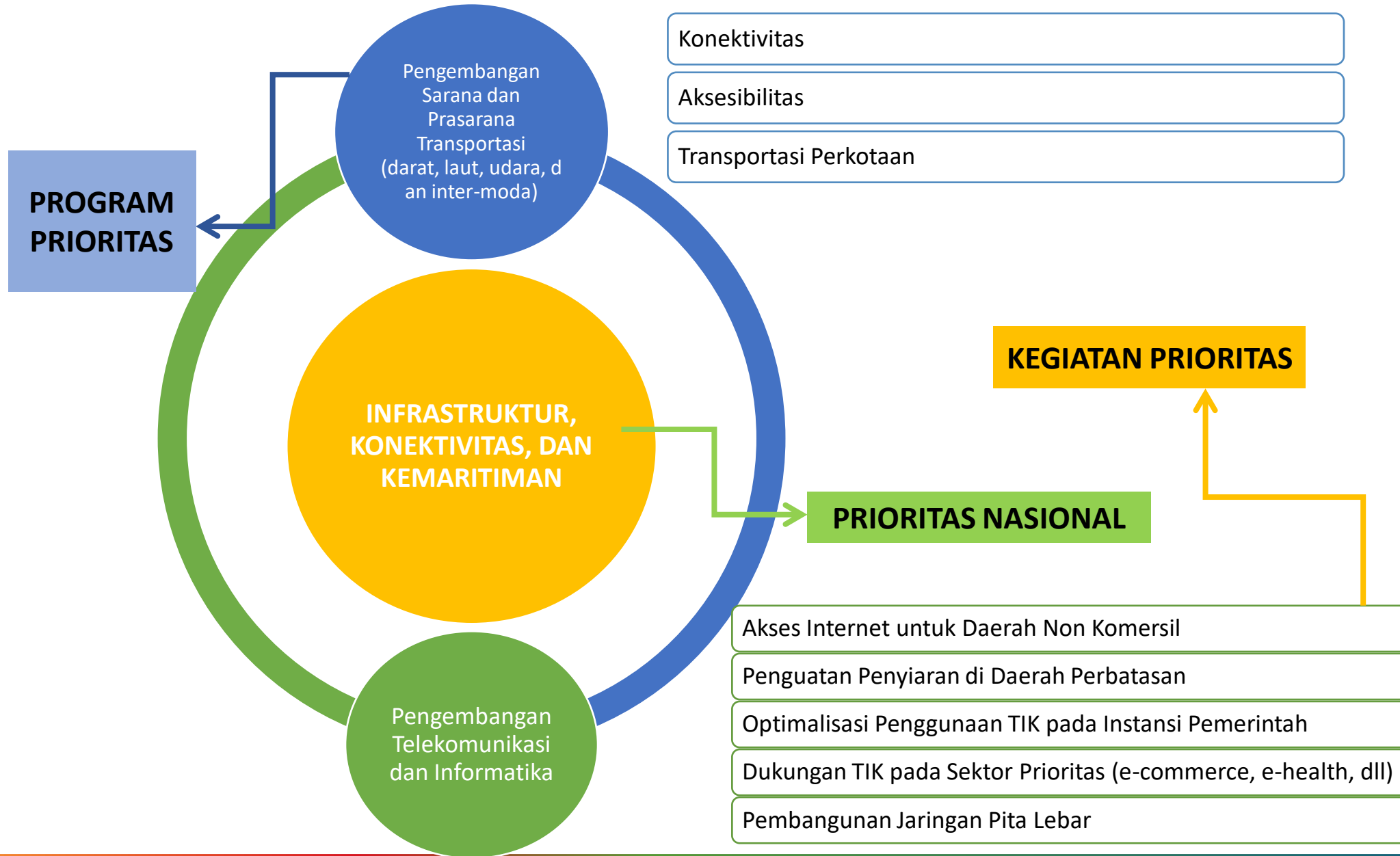
KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
<b>Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan</b>	<b>Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar</b>	<b>Peningkatan Inklusivitas Pelayanan dasar</b>	<b>Penyediaan Layanan Dasar</b>
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui advokasi, sosialisasi dan pelayanan terpadu	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Pendidikan anak berkebutuhan khusus	Penyediaan Infrastruktur Dasar Air Minum, Sanitasi, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya
Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik	Penerapan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan sosial, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman	Advokasi dan edukasi perlindungan anak berkebutuhan khusus	Penyediaan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
	Pemantapan bagi organisasi dan pekerja sosial	Penyediaan Literasi Khusus bagi penyandang disabilitas	Bantuan Subsidi Bunga Kredit Perumahan
	Pelaksanaan Belanja APBD untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan	Pemberian Pelayanan <i>Home Care</i> bagi Lanjut Usia	Bantuan Pembiayaan KPR Swadaya, Sejahtera Tapak, Sarusun
			Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil

## PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
<b>Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha</b>	<b>Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran</b>	<b>Pengembangan Kewirausahaan</b>	<b>Perluasan Akses Pembiayaan</b>	<b>Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha</b>
<b>PROYEK PRIORITAS</b>	<b>PROYEK PRIORITAS</b>	<b>PROYEK PRIORITAS</b>	<b>PROYEK PRIORITAS</b>	<b>PROYEK PRIORITAS</b>	<b>PROYEK PRIORITAS</b>
Pelatihan SDM KUMKM Berbasis Kompetensi	Penguatan Sistem Bisnis bagi Koperasi/Sentra Usaha Mikro	Pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan	Penguatan Modal KUMKM	Fasilitasi Akta Koperasi	Perbaikan Tata Kelola dan Kelembagaan Koperasi
Pelatihan, Pendampingan, dan Pemagangan	Perluasan Akses Pemasaran	Pengembangan Inkubator Bisnis	Peningkatan Akses UMKM untuk Mendapat Kredit	Registrasi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Fasilitasi Kelembagaan Usaha Koperasi bagi BUM Desa dan Kelompok Usaha Masyarakat
Pengembangan Layanan Usaha	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha bagi UMKM		Penyediaan Modal Awal Usaha		Pengembangan dan Pengawasan Kemitraan Usaha
	Fasilitasi Sertifikasi, Standardisasi, Merek, dan Pengemasan				Peningkatan Kapasitas Koperasi



## 8. PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN



## Program Prioritas:

### Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Inter-moda)

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Konektivitas	Aksesibilitas	Transportasi Perkotaan
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Kawasan Perbatasan	Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan
Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Kawasan Perbatasan	Pembangunan Fly Over/Under Pass Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Daerah Tertinggal	Penyediaan Armada BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan
Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Daerah Tertinggal	Pengembangan Kota dengan Sistem BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan
Pembangunan/Pembaharuan Kapal Niaga Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penyediaan Armada Perintis Mendukung Daerah Tertinggal	Pengembangan Kota dengan Sistem Angkutan Umum Berbasis Rel Mendukung Angkutan Umum Perkotaan
Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke Bandara/Pelabuhan/Terminal Mendukung Integrasi Antar Moda	Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Perintis Mendukung Daerah Tertinggal	
Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik		
Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Jalur Utama Logistik		
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik		
Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Mendukung Jalur Utama Logistik		

## Program Prioritas:

### Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika

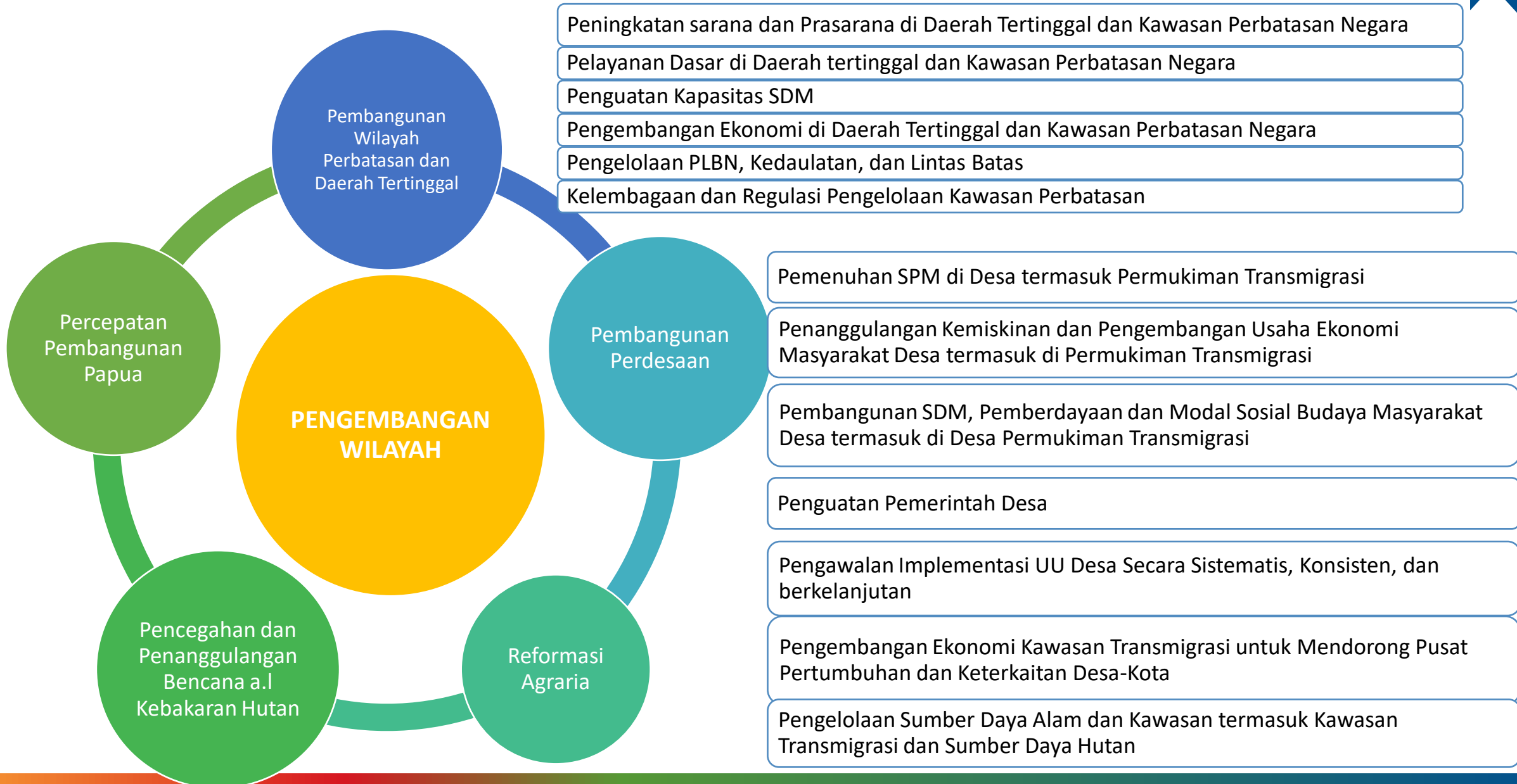
Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Akses Internet Untuk Daerah Non Komersil	Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan	Optimalisasi Penggunaan TIK Pada Instansi Pemerintah	Dukungan TIK Pada Sektor Prioritas (E-commerce, E-health, Dll)	Pembangunan Jaringan Pita Lebar
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pembangunan BTS Di Daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi	Pembangunan Pemancar LPP RRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar	Implementasi Masterplan, Arsitektur E-government Nasional, Dan Piloting Datacenter Nasional	Layanan Pemberian Domain .Id Gratis	Palapa Ring (Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional)
Jasa Akses Internet Broadband Di Wilayah Layanan Telekomunikasi	Pembangunan Pemancar LPP TVRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar	Pemantauan Jaringan Internet Pada ISP/NAP/IX/ Titik Strategis Lainnya Melalui Sistem Deteksi Dini	Fasilitasi Technopreneur Untuk Memperoleh Seed Funding	Penataan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Mendukung Mobile Broadband
Desa Broadband Terpadu	Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Radio Publik		Dukungan TIK Dalam Layanan Kesehatan	
	Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Televisi Publik		Jaringan Pendidikan Nasional Dan E-education	
	Penyediaan Siaran Di Daerah Perbatasan			
	Pelaksanaan Siaran Digital Televisi Publik			



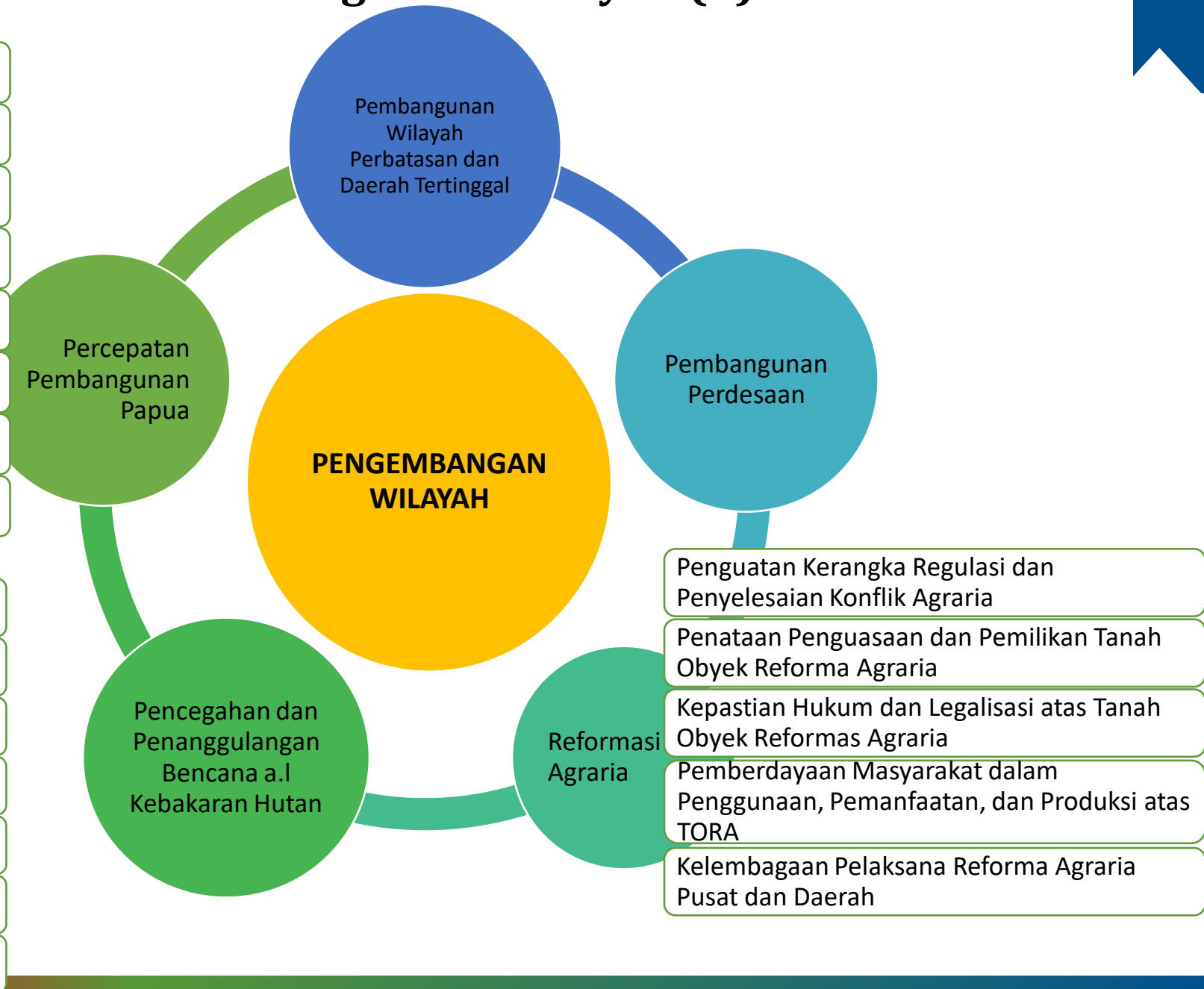
Kementerian PPN/  
Bappenas

## 9. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH

# PN Pembangunan Wilayah (1)



# Arah Kebijakan PN Pembangunan Wilayah (2)



## PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi	Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi	Penguatan Pemerintahan Desa	Pengawasan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan	Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih)	Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa	Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa	Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Penataan Kawasan Sentra Nelayan	Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan
Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan terutama UMKM	Pendidikan di Desa Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Sistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata	Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi	Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa		Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah	Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna
Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah		Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa		Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama	Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan
Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi	Penguatan Permodalan dan Akses Pasar	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa		Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan
		Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antar desa			Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing	Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan

# Rancangan Program Prioritas: Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

## PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana	Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Pelayanan Dasar Kebencanaan	Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana	Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan	Penguatan Kelembagaan dan Regulasi
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi	Sosialisasi dan Simulasi Bencana Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana	Penyediaan Sistem Peringatan dini Pembangunan pusat logistik kebencanaan Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana Pengembangan teknologi kebencanaan	Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana Penyediaan layanan data dan informasi bencana	Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana	Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan Rehabilitasi pesisir Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlan Rehabilitasi DAS	Penyusunan kajian dan peta risiko Penguatan koordinasi penanggulangan bencana Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana

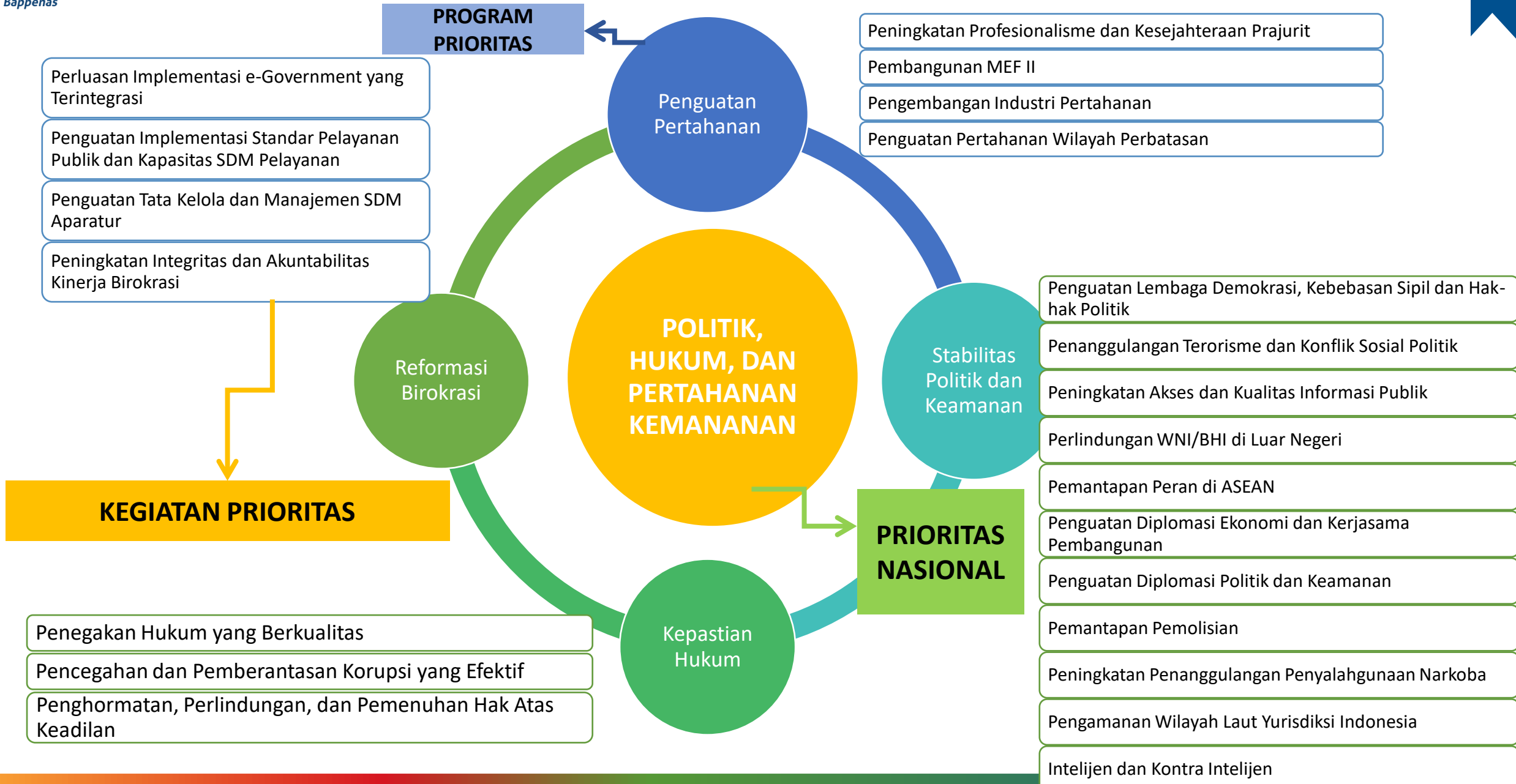
## PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
<b>Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria</b>	<b>Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria</b>	<b>Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA</b>	<b>Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah</b>
<b>Proyek Prioritas Nasional</b>	<b>Proyek Prioritas Nasional</b>	<b>Proyek Prioritas Nasional</b>	<b>Proyek Prioritas Nasional</b>	<b>Proyek Prioritas Nasional</b>
Reviu Peraturan Perundangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria Penyelesaian Konflik Agraria	Inventarisasi P4T dan Identifikasi tanah obyek reforma agraria	Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas Reforma Agraria di Kab/Kota	Koordinasi lokasi dan target pemberdayaan serta perencanaan tata guna pada TORA	Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka RA
Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis	Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria	Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan	Penyediaan bantuan permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal usaha	Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat
Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis	Identifikasi dan Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Tanah Terlantar dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Lainnya	Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sektor) terutama bagi rakyat miskin	Penyediaan bantuan pendampingan dan pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi pada TORA	Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan RA di Tk. Daerah
Melakukan Review terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah Tata Batas Kawasan Hutan untuk Rakyat		Publikasi tata batas kawasan hutan		Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus Konflik Agraria	Identifikasi dan Legalisasi Aset Tanah Milik Masyarakat Miskin di Perkotaan dan Pedesaan	Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi		Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan umum
Mediasi dan ADR Lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis	Penyelesaian Pelepasan Kasawan Hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria termasuk Tata Batas	Legalisasi untuk tanah transmigrasi		
		Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat		



## 10. PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

# PN Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan



# Rancangan Program Prioritas: Penguatan Pertahanan

## PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit	Pembangunan MEF II	Pengembangan Industri Pertahanan	Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan Prajurit	Interoperability Pertahanan Integratif Trimatra	Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan	Pemantapan Pertahanan di Wilayah Natuna dan Perbatasan
Pemantapan latihan dan kesiapsiagaan operasi militer selain perang	Pertahanan Teritorial Strategis		
	Pertahanan Laut dan Dukungan Poros Maritim		
	Pertahanan Ruang Udara Nasional		

## PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (1)

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik	Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	Pemantapan Peran di ASEAN
<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>
Pendidikan Pemilih	Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri	Peningkatan Peran Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia
Pemutakhiran Data Pemilih	Penguatan dan Pemberdayaan Forum-Forum Dialog Kewaspadaan Nasional	Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Penyiaran dan Pers		Regulasi Fasilitas Pajak dan Bea Cukai Sektor Jasa Indonesia dalam MEA
Pengawasan Pemilu Partisipatif				
Bantuan Keuangan Partai Politik	Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme	Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Kominfo		

# Rancangan Program Prioritas: Stabilitas Politik dan Keamanan

## PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (2)

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan	Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan	Pemantapan Pemolisian	Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia	Intelijen dan Kontra Intelijen
<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas</b>
Peningkatan Peran Swasta dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	Penguatan Perundingan Perbatasan	Pencegahan Proaktif Potensi Kejahatan dan Gangguan Ketertiban	Pemberantasan Narkoba	Peningkatan Operasi Kamla di Wilayah Rawan	Deteksi Dini Keamanan Nasional
Penguatan Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika dan Amerika Latin	Implementasi <i>Document of Conduct</i> dan kemajuan substantif perumusan <i>Code of Conduct</i>	Penanganan Kejahatan dan Gangguan Ketertiban	Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba		Pengamanan Data dan Informasi Negara
Pembentukan <i>Single Agency</i> KSST	Pencapaian Visi 4000 <i>Peacekeepers</i>	Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang Bermartabat			
Penguatan Diplomasi Maritim (Ekonomi)	Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB				
Penguatan Diplomasi Ekonomi di Pasar Prospektif	Penguatan Diplomasi Maritim (Politik - Keamanan)				

## PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM

### Kegiatan Prioritas

#### Penegakan Hukum yang Berkualitas

### Proyek Prioritas

Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Penuntutan

Pengurangan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Masyarakat

Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara (SPPT-TI)

Pelayanan Hukum yang mendukung Kemudahan Berusaha

Peningkatan kapasitas SDM Apgakum dan Pemahaman Masyarakat tentang SPPA

Evaluasi dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

### Kegiatan Prioritas

#### Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif

### Proyek Prioritas

Kolaborasi Pencegahan Korupsi

Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di tingkat Pusat

### Kegiatan Prioritas

#### Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan

### Proyek Prioritas

Penguatan SPPT-PKKTP dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Peningkatan Kerjasama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal di Kab/Kota dalam Penyaluran Bantuan Hukum

# Rancangan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi

PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI			
Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
<p>Perluasan Implementasi <i>e-Government</i> yang terintegrasi</p>	<p>Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan</p>	<p>Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur</p>	<p>Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</p>
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
<p>Penerapan <i>e-Government</i> pada instansi pemerintah pada 705 K/L/D (antara lain: <i>e-Office, e-Performance, e-Budgeting, e-Management-Kepegawaian, Complain Handling Mechanism (LAPOR)</i>)</p> <p>Penerapan <i>e-Services</i> pada 50% dari unit pelayanan publik yang ada</p> <p>Desain perbaikan infrastruktur dan penerapan <i>e-Arsip</i> di 163 K/L</p> <p>Pengintegrasian <i>e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting</i> antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenpan-RB</p> <p>Penguatan Sistem <i>Monev-Next Generation</i> online PBJ seluruh K/L/D yang terintegrasi dengan RENJA dan RKA K/L</p>	<p>Pelatihan Aparatur Pelayanan Publik di masing-masing unit pelayanan publik</p> <p>Penerapan SPM pada seluruh unit pelayanan publik (100%)</p> <p>Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat</p> <p>Rekomendasi perbaikan kebijakan pelayanan publik</p>	<p>Restrukturisasi kelembagaan STIA-LAN menjadi <i>National Institute for State Aparatus</i></p> <p>Penyusunan <i>Human Capital Development Plan</i>-Pemenuhan kebutuhan Diklat minimal 40 jam untuk mendukung kompetensi inti ASN</p> <p><i>Grand Design Public Administration</i></p> <p>Penataan kelembagaan LPNK</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian / ASN</p> <p>Pengembangan <i>talent pool</i> ASN nasional</p> <p>Penerapan regulasi teknis manajemen ASN di seluruh K/L/D</p> <p>Pelaksanaan diklat RLA</p> <p>Pengawasan pelanggaran netralitas dan sistem merit ASN</p> <p>Penguatan Inovasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah</p>	<p>Penerapan Sistem Integritas Aparatur Negara di seluruh K/L (100%)</p> <p>Beasiswa dan diklat untuk 10.000 orang di Bidang Pengawasan/Auditor</p> <p>Penguatan kapasitas dan pemenuhan 17 standarisasi pada 610 LPSE</p> <p>Kebijakan untuk perbaikan seluruh kinerja K/L</p> <p>Peningkatan Efektifitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa</p>

**Terima Kasih**